

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI SMP NEGERI 3
KOTA TARAKAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Tazqy Hidayat
NIM 09110241019

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JUNI 2015**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA ERA OTONOMI DAERAH DI SMP NEGERI 3 KOTA TARA KAN” yang disusun oleh Tazqy Hidayat, NIM 09110241019 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan

Pembimbing I

Dr. Siti Irene Dwi Astuti, M. Si
NIP. 19610908 198901 2 001

Yogyakarta, 2 April 2015

Pembimbing II

P. Priyoyuwono M.Pd
NIP. 19560622 19870 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Tazqy Hidayat

NIM : 09110241019

Program Studi : Kebijakan Pendidikan

Fakultas : Ilmu Pendidikan

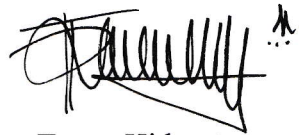
Judul : Implementas kebijakan Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Tarakan

Dengan Ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Yang menyatakan,



Tazqy Hidayat

NIM 09110241019

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI SMP NEGERI 3 KOTA TARAKAN ” yang disusun oleh Tazqy Hidayat, NIM 09110241019 ini telah dipertahankan didepan dewan penguji pada tanggal 24 April 2015 dan dinyatakan lulus.


DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dr. Siti Irine Astuti D., M. Si	Ketua Penguji		21-5-'15
L.Hendrowibowo, M. Pd	Sekretaris Penguji		21-5-'15
Dr. Wiwik Wijayanti M. d	Penguji Utama		21-5-'15
Petrus Priyoyuwono, M. Pd	Penguji Pendamping		22-5-'15

17 JUN 2015

Yogyakarta,
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan.




Dr. Haryanto, M. Pd
NIP. 19600902 198702 1 001

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Aku adalah pejalan kaki yang lamban, namun pantang bagiku berjalan mundur kebelakang”

(Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahman dan Rahim-Nya, karya ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak Suriansyah Kemat dan Ibu Hidayati, atas kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa
- ❖ Kedua kakakku, Rian Hidayat dan Rosa Rabel, atas teladan dan kasih sayang yang membawaku pada kedewasaan.
- ❖ Guru-guru yang mendidikku hingga menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak.
- ❖ Keluarga besar Asrama Mahasiswa Kaltim di Yogyakarta, dimana tempat suka dan duka, tempat bahagia selama masa kuliah di tanah rantau.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI SMP NEGERI 3 TARAKAN

Oleh:
Tazqy Hidayat
NIM. 09110241013

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Tarakan. Serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya.

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh melalui wawancara kepada para informan dan responden. Sementara untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan tiga metode, yaitu metode observasi, wawancara, dan kajian dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada 6 (enam) standar pelayanan minimal pendidikan yang harus dipenuhi oleh SMP Negeri 3 Kota Tarakan yaitu standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kurikulum, standar penjaminan mutu pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan yang terakhir ialah standar manajemen sekolah. Dari 6 standar yang telah ditetapkan pemerintah, ada 3 (tiga) standar yang belum terpenuhi yaitu standar sarana dan prasaran, khususnya pada indikator ketersediaan buku tulis, standar kurikulum khususnya pada indikator guru yang menerapkan RPP, dan standar penjaminan mutu pendidikan khususnya pada indikator kegiatan kunjungan pengawas. Adapun faktor pendukung dari proses kebijakan standar pelayanan minimal di SMP Negeri 3 Kota Tarakan ialah adanya sistem *moving class*. Selain itu faktor penghambatnya ialah tidak tersediaanya buku pelajaran, guru yang menerapkan RPP kegiatan kunjungan pengawas ke sekolah

Kata kunci: *implementasi kebijakan, standar pelayanan minimal pendidikan, SMP Kota Tarakan*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-, sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesabaran dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Era Otonomi Daerah Di Smp Negeri 3 Kota Tarakan” ini dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari Skripsi ini masih terdapat kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi meningkatkan pengetahuan. Semoga bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 1 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Batasan Masalah	16
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	17
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teori	18
1. Konsep Implementasi Kebijakan	18
a. Implementasi Kebijakan	18
b. Pengertian Kebijakan	20
2. Pengertian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah Pertama	22
a. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	22
3. Otonomi Daerah	32

a. Dasar Hukum	34
B. Penelitian yang Relevan	35
C. Kerangka Berpikir	39
D. Pertanyaan Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Subjek dan Objek Penelitian	44
C. Setting Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
1. Metode Observasi	47
2. Metode Wawancara	47
3. Kajian Dokumen (<i>Document Study</i>)	47
E. Teknik Analisis Data	48
1. Peringkasan Data	49
2. Penyajian Data	49
3. Menarik Kesimpulan	49
F. Keabsahan Data	49
1. Pengujian <i>Credibility</i>	50
2. Pengujian <i>Transferability</i>	50
3. Pengujian <i>Dependability</i>	51
4. Pengujian <i>Confirmability</i>	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	52
1. Gambaran Umum Kota Tarakan	52
2. Gambaran Umum SMP Negeri 3	55
a. Profil SMP Negeri 3 Tarakan	55
b. Sejarah SMP Negeri 3 Tarakan	55

B. Analisis Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Oleh Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan di SMP Negeri 3 Tarakan.....	57
1. Sarana Prasarana	59
a. Keterjangkauan Jarak Satuan Pendidikan.....	59
b. Jumlah Siswa dalam Rombongan Kelas dan Kelengkapan.....	60
c. Ketersediaan Laboratorium IPA.....	62
d. Ketersediaan Ruang Guru dan Kelengkapannya.....	62
e. Ketersediaan Buku Teks	62
f. Ketersediaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi	64
g. Jam Kerja Guru Tetap Per Minggu di Satuan Pendidikan.....	65
2. Pendidik dan tenaga kependidikan.....	66
a. Ketersediaan Guru di Setiap Satuan Pendidikan.....	66
b. Ketersediaan Guru Berkualifikasi dan Bersertifikat Pendidik	67
c. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Guru Untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	68
d. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Kepala Sekolah.....	69
e. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Pengawas Sekolah	69
f. Jam Proses Pembelajaran Disatuan Pendidikan.....	70
3. Kurikulum.....	71
a. Kegiatan Pemerintah Daerah dalam Membantu Satuan Pendidikan.....	71
b. Penerapan Kurikulum Satuan Pendidikan	72
c. Guru yang Menerapkan RPP Di Satuan Pendidikan	73
4. Penjaminan Mutu Pendidikan.....	74
a. Kegiatan Kunjungan Pengawas ke Satuan Pendidikan	74
b. Kegiatan Supervisi Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan.....	75

c. Laporan Evaluasi Guru di Satuan Pendidikan	75
d. Pelaporan Pendidikan Peserta Didik	76
5. Penilaian Pendidikan	77
6. Manajemen Sekolah	78
C. Pembahasan Hasil Penelitian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMP Negeri 3 Tarakan.....	79
1. Sarana Prasarana	80
a. Keterjangkauan Jarak Satuan Pendidikan.....	80
b. Jumlah Siswa dalam Rombongan Kelas dan Kelengkapan.....	80
c. Ketersediaan Laboratorium IPA.....	81
d. Ketersediaan Ruang Guru dan Kelengkapannya.....	81
e. Ketersediaan Buku Teks	81
f. Ketersediaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi	81
g. Jam Kerja Guru Tetap per Minggu di Satuan Pendidikan.....	82
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	83
a. Ketersediaan Guru di Setiap Satuan Pendidikan.....	83
b. Ketersediaan Guru Berkualifikasi dan Bersertifikat Pendidik	83
c. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Guru Untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.....	83
d. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Kepala Sekolah.....	84
e. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Pengawas Sekolah	84
f. Jam Proses Pembelajaran di Satuan Pendidikan	84
3. Kurikulum.....	85
a. Kegiatan Pemerintah Daerah dalam Membantu Satuan Pendidikan	85
b. Penerapan Kurikulum Satuan Pendidikan	85
c. Guru yang Menerapkan RPP di Satuan Pendidikan.....	85

4. Penjaminan Mutu Pendidikan.....	87
a. Kegiatan Kunjungan Pengawas ke Satuan Pendidikan.....	87
b. Kegiatan Supervisi Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan.....	87
c. Laporan Evaluasi Guru di Satuan Pendidikan	87
d. Pelaporan Pendidikan Peserta Didik	87
5. Penilaian Pendidikan	89
6. Manajemen Sekolah	91
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMP Negeri 3 Tarakan.....	92
1. Sarana Prasarana	93
a. Jumlah dalam Setiap Rombongan Kelas dan Kelengkapan Kelas.....	93
b. Ketersediaan Buku Teks Pelajaran.....	94
2. Kurikulum	95
3. Penjaminan Mutu Pendidikan.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Kabupaten Kota.....	26
Tabel 2. Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan	28
Tabel 3. Komparasi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini.....	37
Tabel 4. Profil SMP Negeri 3 Tarakan.....	55
Tabel 5. Analisis Pelayanan Pendidikan Oleh Kabupaten Kota dan Satuan.....	58
Tabel 6. Jumlah Siswa dalam Setiap Rombongan Kelas (Rombel).....	60
Tabel 7. Ketersediaan Buku Teks.....	63
Tabel 8. Ketersediaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi.....	65
Tabel 9. Jam Kerja Guru Tetap Perminggu di SMP Negeri 3 Tarakan.....	65
Tabel 10. Capaian Indikator Standar Pelayanan Sarana Prasarana.....	66
Tabel 11. Ketersediaan guru di SMP Negeri 3 Tarakan.....	67
Tabel 12. Ketersediaan Guru Berkualifikasi dan Bersertifikat Pendidik di SMP Negeri 3 Tarakan	68
Tabel 13. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Guru	69
Tabel 14. Kualifikasi akademik dan Sertifikat Pendidik Pengawas Sekolah.....	70
Tabel 15. Jam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 3 Tarakan.....	70
Tabel 16. Capaian Standar Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ...	71
Tabel 17. Guru Yang Menerapkan RPP di SMP Negeri 3 Tarakan.....	73
Tabel 18. Capaian Standar Pelayanan Kurikulum.....	74
Tabel 19. Capaian Standar Pelayanan Penjaminan Mutu Pendidikan	76
Tabel 20. Perbandingan Indikator Pelayanan dengan Kondisi di Sekolah.....	79

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Kerangka Berpikir	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Surat-Surat Perijinan Penelitian.....	108
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	116
Lampiran 3. Catatan Lapangan dan Hasil Wawancara.....	119
Lampiran 4. Dokumentasi Foto	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dalam arti luas telah mulai dilaksanakan sejak manusia berada di muka bumi. Keberadaan pendidikan ialah seumur dengan adanya manusia itu sendiri. Seiring perkembangan peradaban, berkembang pula isi dan bentuk termasuk perkembangan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sejalan dengan kemajuan manusia tentang pendidikan.

Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas proses pendidikan. Lingkungan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Belum memadainya tempat untuk berlangsungnya proses pendidikan (termasuk di dalamnya gedung sekolah) dan perlengkapan, alat-alat pendidikan, materi pendidikan, sarana olahraga dan rekreasi, kurang terbukanya anggota masyarakat, dan rendahnya penghasilan penduduk dapat menghambat usaha pendidikan.

Di Indonesia pendidikan sudah ada pada jaman penjajahan, bekas Pemerintah Kolonial Belanda dan Jepang meninggalkan tapak tapaknya di tanah air. Pemerintah kolonial Belanda telah mencangkokkan sistem pendidikan negaranya di daerah nusantara. Selain itu kekuasaan politik dan ekonomi Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara maju lainnya yang menguasai sebagian besar wilayah dunia, dan mempunyai pengaruh yang besar pada lembaga-lembaga pendidikan di Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Rekonstruksi budaya masyarakat dan renovasi sistem pendidikan Indonesia pasca penjajahan Belanda dan Jepang mengalami banyak hambatan. Tiga faktor yang potensial menghalang kegiatan rekonstruksi tersebut adalah (1) lambatnya perjuangan modernisasi sistem politik yang bermuara pada sulitnya menentukan kebijakan pendidikan yang cocok bagi Indonesia yang baru mencapai kemerdekaan, (2) sulitnya mengubah mental pemimpin Indonesia dari kebiasaan ketergantungan, sehingga mereka cenderung berorientasi pada saran dan sugesti para ilmuwan negara-negara barat dan mengunggulkan model pendidikan negara-negara barat yang belum tentu cocok dengan kebutuhan pendidikan Indonesia, (3) sulitnya membangkitkan kreativitas masyarakat dalam pendidikan sebagai akibat pengalaman historis yang menyebabkan kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan (Dimiyati, 2000).

Kelembagaan pendidikan dan praktek pendidikan Indonesia masih berupa pola-pola melanjutkan pendidikan penjajahan dan budaya kolonial dari masa lampau. Sebagian institusi pendidikan Indonesia merupakan pencangkakan lembaga pendidikan negara-negara yang sudah maju, sehingga dalam praktek sehari-hari, hasil pendidikan kurang mencerminkan aspirasi bangsa sendiri, kurang mengembangkan sifat-sifat kepribumian, kurang mengembangkan unsur-unsur budaya lokal dan nasional. Anak didik yang menerima pendidikan semacam ini akhirnya mengalami alienasi terhadap budaya sendiri, yang akhirnya merasa asing pula terhadap hakikat diri sendiri, lingkungan, bahasa ibu dan pengalaman eksistensial.

Kemajuan masyarakat industri Eropa adalah hasil dari akumulasi empat gugus institusi, yang menurut pandangan Giddens (Dimiyati, 2000) sebagai hubungan komplementer dari (1) kapitalisme, (2) industrialisme, (3) pengawasan, dan (4) kekuatan militer. Rembesan model institusi ini di Indonesia menjelma dalam praktek-praktek pendidikan yang bersifat otoriter, pendidikan berpusat pada guru, menjejalkan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak didik, tidak adanya komunikasi interaktif antara guru dan siswa, murid dituntut menghafal secara mekanis, guru cenderung bercerita tentang pelajaran dan murid mendengarkan. Guru menguraikan suatu topik yang sama sekali asing bagi pengalaman eksistensial para murid. Yang terjadi bukannya proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi “tabungan” yang diterima, dihafal, diulangi dengan patuh oleh para murid. Inilah konsep pendidikan “gaya bank” (Freire, 1985; Kartini Kartono, 1997; Suyanto, 2001). Pendidikan gaya bank menghasilkan insan-insan yang jati dirinya tersimpan dan miskin daya cipta, daya ubah, dan pengetahuan.

Di samping praktek pendidikan gaya bank, institusi pendidikan Indonesia yang masih berpola ketergantungan pada pendidikan negara-negara maju memberikan dampak kurang menguntungkan masyarakat Indonesian dan masih mewarnai sistem pendidikan Indonesia hingga sekarang. Sistem pendidikan nasional ternyata lebih mengutamakan uniformitas atas dasar kesatuan dan persatuan bangsa, untuk menjamin keamanan negara dan stabilitas pemerintahan (Suyanto, 2001). Kelemahan

sistem pendidikan semacam itu ialah operasionalisasi konkretnya di lapangan menjadi kurang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat lokal yang beragam, dan corak sosial ekonomi serta kebudayaan yang bervariasi. Lebih-lebih ekspansi dan modernisasi pendidikan dengan penekanan pada pemberian materi pengajaran yang lebih banyak bersifat urban dan universal serta kurang memperhatikan situasi kondisi lokal akan meningkatkan harapan ekonomis dan ambisi-ambisi material yang sulit terpuaskan.

Di samping itu, hasrat emosional untuk mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di negara-negara kaya dan maju, banyak mendominasi para penentu kebijakan pendidikan. Mereka hampir selalu berada di dalam utopia dan kurang berpijak pada realitas bangsa sendiri, khususnya bagi masyarakat lapisan bawah. Ide-ide utopis tersebut ternyata menghambat pemimpin pendidikan dalam membangun model-model pendidikan yang bernafaskan kepribumian yang justru berfaedah bagi masyarakat dan sinkron dengan kebudayaan asli Indonesia.

Praksis pendidikan Indonesia menurut paradigma lama sesungguhnya telah banyak mengalami kemajuan, baik proses, kuantitas, maupun kualitasnya. Perubahan-perubahan fundamental terjadi di dalam pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka. Suatu sistem pendidikan nasional yang elitis yang diwarisi dari pemerintahan kolonial dan militerisme Jepang diubah menjadi sistem pendidikan yang populis yang banyak membuka kesempatan untuk seluruh anak bangsa. Lebih-lebih

pendidikan di awal-awal kemerdekaan, seperti yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, banyak menempatkan kepentingan humanisasi dan berusaha mengubur pendidikan yang dehumanis warisan penjajahan. Namun, hal ini belum menampakkan hasil dan layu sebelum berkembang. Dalam perjalanan pendidikan selama Orde Baru, sedikitnya terdapat empat indikator perkembangan sistem pendidikan nasional (Tilaar, 2000), yaitu: (1) popularisasi, (2) sistematisasi, (3) proliferasi, (4) politisasi pendidikan. Popularisasi pendidikan selama Orde Baru melahirkan konsep pengembangan sumber daya manusia yang menjadi prioritas utama, di samping sumber-sumber alamiah. Paradigma ini dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia telah unggul dalam bidang sumber daya alam, tetapi lemah dalam sumber informasi iptek, kelembagaan dan peraturan, sumber modal, dan sumber kebudayaan (Oetama & Widodo, 1990). Di samping itu, dengan didorong oleh gerakan *education for all*, muncul pula paradigma pemberantasan kemiskinan yang akhirnya melahirkan program-program wajib belajar yang bermula diberlakukannya wajib belajar 6 tahun yang kemudian menjadi 9 tahun. Krisis yang dirasakan sebagai akibat paradigma tersebut adalah terpuruknya sumber daya manusia Indonesia yang tercermin dari tingkat keterampilan tenaga kerja Indonesia terendah di Asia dan semakin bertambahnya pengangguran. Posisi daya saing Indonesia tahun 2012 berada pada peringkat ke-50 dari 144 negara, atau menurun 5 tingkat dibandingkan setahun sebelumnya.

Jika dilihat peringkat untuk masing-masing pilar daya saing, maka posisi Indonesia terpuruk pada pilar efisiensi pasar tenaga kerja yaitu peringkat ke-120, disusul pilar kesiapan teknologis yang menempati peringkat ke-85, dan infrastruktur pada peringkat ke-78. Pilar terbaik untuk Indonesia hanya terletak pada ukuran pasar (16), lingkungan makroekonomi (25), dan inovasi (39). *(sumber : <http://www.jpnn.com>)*

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Visi Pendidikan Nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah

dalam mewujudkan visi tersebut antara lain; (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional, (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global, (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, (5) meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan, (6) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi: (1) penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstranformasi pengetahuan bergeser ke paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya, (2) perubahan

pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana-prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada abad ke-21 ini adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. Padahal, gambaran umum mutu sumber daya manusia Indonesia setiap tahun menunjukkan tingkat pembangunan yang masih memprihatinkan, demikian juga peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing Indonesia masih sangat rendah belum sesuai yang kita harapkan. Laporan terbaru dari situs resmi BBC Indonesia, Indeks Daya Saing Global menempatkan Indonesia pada peringkat 38 dari 148 negara di dunia atau naik dari peringkat 50 tahun lalu. Meski naik peringkat, dalam indeks yang sama tingkat daya saing Indonesia di kawasan ASEAN masih berada di bawah Malaysia (24), Brunei (26), dan Thailand (37). Kondisi ini adalah sebuah realitas yang menjadi isyarat bahwa Pemerintah dan

masyarakat Indonesia harus bekerja keras secara terus menerus dan konsisten meningkatkan mutu pendidikan manusia dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah ditempuh melalui berbagai strategi, akan tetapi hasil pembangunan pendidikan Indonesia sampai saat ini masih menjadi “catatan merah” Indikator berdasarkan indeks kinerja Pembangunan Manusia masih cukup memprihatinkan, terpuruknya kondisi *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2010 menempati peringkat 108. Hal ini berarti bahwa Indonesia tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Negara Singapura (27), Negara Brunei Darussalam (37), Negara Malaysia (57), Negara Thailand (92) dan Negara Philipina (97). (United Nations Development Program: 2011)

Indikator rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia di atas, menjadi perhatian bagi Pemerintah, terutama Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan mutu pendidikan di Indonesia. Sebab penilaian *Human Development Index (HDI)* yang diukur dengan indikator-indikator antara lain, (1) penilaian terhadap rata-rata usia harapan hidup, (2) tingkat keaksaraan atau melek huruf, (3) lama menempuh pendidikan dan (4) kemampuan daya beli masyarakat atau pengeluaran perkapita. Berdasarkan dua indikator yaitu kesehatan dan indikator pendidikan, jelas

menunjukkan korelasi langsung dan merupakan mata rantai yang tidak terputuskan serta mempunyai pengaruh signifikan terhadap mutu Sumber Daya Manusia. Dengan demikian rendahnya tingkat kesehatan dan rendahnya mutu pendidikan masyarakat merupakan bukti belum berhasilnya pembangunan Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan.

Untuk mengatasi segala permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Indonesia berusaha merancang suatu sistem pendidikan yang modern dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman. Dengan lahirnya UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, Pemerintah Indonesia bermaksud memberikan otoritas kepada masing-masing daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan kondisi dan sumber daya manusia yang ada di daerah.

Salah satu pemikiran yang melandasi lahirnya Undang-Undang tersebut ialah kebutuhan untuk menghadapi tantangan global. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah lebih terpacu untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya agar mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Kemampuan seperti itu dapat dicapai dengan pendidikan yang bermutu. Bukan hanya mampu memenuhi standar nasional, tapi juga internasional agar mampu bersaing dengan negara lain. Namun hal ini tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, dengan diberlakukannya desentralisasi maka pelaksanaan pendidikan diselenggarakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

yang mutu sumber daya manusianya, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kemampuan pembiayaan yang berbeda-beda. Bukan hanya Indonesia yang menerapkan desentralisasi seperti ini, sebagai contoh di negara Chile menunjukkan desentralisasi pendidikan berhasil mengakomodasi aspirasi pendidikan masyarakat sehingga angka partisipasi pendidikan meningkat tajam. Namun di sisi lain mutu pendidikan negara itu merosot karena sumber dana untuk mendukungnya terbatas. Perbedaan kemampuan pembiayaan yang cukup besar antar daerah bila tidak diatasi dengan kesadaran dan jiwa patriotisme akan memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antar daerah.

Pemerintah melalui kebijakan desentralisasi telah membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan pusat-daerah. Dengan demikian, yang sudah berjalan bertahun-tahun itu dapat menyuburkan proses reformasi pada tingkat lokal dan memberi ruang gerak pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah. Desentralisasi sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk pendidikan. Otonomi daerah yang proses implementasinya dari 1 Januari 2000 tidaklah berjalan mulus dan mengalami banyak kendala-kendala, baik itu pada tataran konseptual maupun praktek-praktek lapangan yang jika tidak dilakukan perbaikan segera akan menghambat tujuan otonomi daerah itu sendiri.

Dengan berbagai macam proses pendidikan yang dialami dari zaman ke zaman maka perkembangan ilmu pengetahuan dan pola pikir manusia menuju kepada kehidupan manusia yang beradab, ditata dengan sistem yang teratur dan ditopang oleh teknologi yang semakin canggih. Pendidikan juga suatu instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, serta dalam konteks lebih luas merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh. Mengingat peran penting dan strategis pendidikan, maka selayaknya pendidikan dijadikan prioritas utama pembangunan baik di pusat, propinsi maupun daerah. Untuk mendukung tercapainya pembangunan yang diharapkan, Pemerintah telah membuat suatu tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, diperlukan adanya Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai pedoman

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (<http://bsnp-indonesia.org>)

Kondisi saat ini pendidikan nasional kita masih menghadapi berbagai permasalahan pemerataan dan kualitas. Disamping secara umum masih perlu ditingkatkan, kualitas pendidikan kita juga masih tidak merata. Berbagai laporan yang disampaikan baik oleh Kemendiknas, Kemenag, maupun Bappenas menunjukkan variasi kinerja pendidikan antar daerah yang signifikan. Variasi ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan prioritas Pemerintah dan sejalan dengan itu variasi kualitas antar daerah harus dikurangi dan bahkan dihilangkan, untuk selanjutnya ditingkatkan secara nasional. SPM merupakan instrument yang baik untuk membantu mengidentifikasi sekolah dan madrasah paling memerlukan bantuan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas.

Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan

dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas SPM tersebut.

Sekolah sebagian besar belum memenuhi standar pelayanan minimal. Perbedaan mutu sumber daya manusia dan pendanaan pendidikan yang berbeda beda di tiap daerah menyebabkan masih belum tercapainya hal tersebut. Pencapaian standar pelayanan pendidikan sangat berkaitan dengan kemampuan daerah untuk membiayai seluruh proses pelaksanaannya. Pemerintah telah mengambil kebijakan mengatur anggaran pendidikan baik di pusat, propinsi maupun daerah haruslah minimal 20% dari anggaran keseluruhan. Ini tentu saja secara kuantitatif merupakan berita baik bagi penyelenggara pendidikan karena sudah terbayang peningkatan kesejahteraan dari anggaran ini.

Namun setinggi apapun biaya yang dianggarkan untuk pendidikan, tetap saja pemerataan akses menjadi indikator terkuat keberhasilan pembangunan pendidikan di daerah. Pendidikan seharusnya dapat dinikmati oleh semua warga negara baik diperkotaan maupun pedesaan, masyarakat ekonomi mapan maupun yang tidak mapan. Untuk itu peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan mendapat perhatian yang serius sehingga seluruh masyarakat dimanapun keberadaannya mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya sampai pendidikan dasar yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kajian ini bertujuan untuk Mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kota Tarakan terhadap Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, selain itu untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah Di SMP Negeri 3 Kota Tarakan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang ”Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan “.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditemukan identifikasi masalah disini yaitu:

1. Upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah ditempuh melalui berbagai strategi, akan tetapi hasil pembangunan pendidikan Indonesia sampai saat ini masih menjadi “catatan merah” indikator berdasarkan indeks kinerja Pembangunan Manusia masih cukup memprihatinkan
2. Sekolah sebagian besar belum memenuhi standar pelayanan minimal. Perbedaan mutu sumber daya manusia dan pendanaan pendidikan yang berbeda beda di tiap daerah menyebabkan masih belum tercapainya hal tersebut.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian agar diketahui arah jalan penelitian tersebut. Suharsimi Arikunto (2000:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian.

Perumusan masalah yang diformulasikan/ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kota Tarakan terhadap Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Mengetahui proses Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah Di SMP Negeri 3 Kota Tarakan.
3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi perkembangan ilmu kebijakan publik berkaitan dengan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

2. Segi Praktis

- a. Menambah wawasan penulis dalam masalah Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
- b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Implementasi Kebijakan

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Wahab, 2004).

Dalam perumusan suatu kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti.

Konsep implementasi kebijakan dalam arti luas adalah merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kewajiban guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami

sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil (Lester dan Stewart, 2000).

Tahap Implementasi Kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan dan saran-saran diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian tahap implementasi terjadi hanya setelah Undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai kebijakan tersebut.

Van Mater dan Van Horn menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. (Leo Agustino, 2006)

Soenarko (1998), mengemukakan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah:

1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat;
2. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu;
3. Pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran;
4. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang

ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada publik.

Selanjutnya Quade (1984), mengatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

b. Pengertian Kebijakan

Konsep kebijakan (*policy*) erat kaitannya dengan kebijaksanaan seseorang untuk pengambilan suatu keputusan dari berbagai alternatif pilihan (*chosen alternative*). Kebijakan merupakan serangkaian pengambilan keputusan sehingga tidak hanya sekali dilakukan pengambilan keputusan demi tercapainya kepentingan bersama. Berikut beberapa konsep, definisi, dan pengertian kebijakan menurut pendapat ahli :

- 1) James Anderson (H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 183) mendefinisikan kebijakan sebagai *a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a*

problem or matter of concern. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu.

- 2) Sedangkan Heclo (1972) mengatakan bahwa “*Policy is not self evident term*” (Kebijakan bukanlah sebuah istilah yang jelas dengan sendirinya). Selanjutnya Heclo menyarankan dan sekaligus menunjukkan bahwa : “Kebijakan itu lebih baik jika dipandang sebagai tindakan yang disengaja daripada dipandang sebagai keputusan atau tindakan-tindakan tertentu” (dalam Wahab, 2004) dalam pengertian ini mendalilkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan negara adalah pada apa yang senyatanya dilakukan oleh Pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.
- 3) Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Carl J. Friedrich, kebijakan diartikan sebagai “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu” (dalam Irfan Islamy, 1997).

Dari ketiga pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ialah suatu keputusan yang diambil dalam menghadapi permasalahan tertentu, dan kebijakan tidaklah lahir dengan sendirinya, ada berbagai macam aktor

yang mengusulkan berbagai pendapat terbaik dan dipilih salah satunya untuk diterapkan.

2. Pengertian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

a. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Kerangka perundang-undangan yang baru di bidang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah) dan di bidang pendidikan (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan.

Dalam perkembangannya, Pemerintah telah pula menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas menyusun Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang mengatur antara lain tentang: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pengelolaan; (6) Standar Sarana Prasarana; (7) Standar Pendanaan; dan (8) Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan. Hal ini mengakibatkan SPM Bidang Pendidikan pun mengalami perubahan. Karena itu, semua pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan perlu memahami perubahan SPM ini.

Pemerintah telah mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 (Permendiknas No. 23/2013). Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Dengan dikeluarkannya SPM Pendidikan berdasarkan Permendiknas No. 23/2013, maka SPM pendidikan yang dikeluarkan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 15 Tahun 2010 yang terkait dengan pendidikan dasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

SPM Pendidikan merupakan instrumen pengelolaan kinerja pembangunan di bidang pendidikan. Dengan demikian SPM akan membantu menstrategikan pencapaian berbagai sasaran pembangunan pendidikan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring, dan evaluasi kinerja.

SPM Pendidikan disusun dengan tujuan mencapai hasil peningkatan kualitas pendidikan semaksimal mungkin dalam batasan sumberdaya yang tersedia. Sejalan dengan prinsip ini identifikasi dan pemilihan elemen SNP yang akan dimasukkan dalam SPM dilakukan dengan

kriteria utama memiliki daya ungkit terbesar pada perbaikan kualitas pendidikan.

SPM berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa siswa di semua sekolah dan madrasah memperoleh layanan setidaknya pada level minimal tertentu, sehingga kualitas pembelajaran dan kinerjanya terjamin pada tingkat yang memadai. SPM memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penyelenggaraan layanan pendidikan oleh sekolah dan madrasah serta Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama. Pemahaman yang lebih baik membantu memastikan program pembangunan pendidikan lebih fokus dan efektif meningkatkan kualitas pendidikan terutama di sekolah dan madrasah yang relatif tertinggal.

SPM menyediakan dasar bagi Pemerintah pada masing-masing jenjang untuk menyusun program, kegiatan, dan memperjuangkan anggaran untuk memastikan bahwa setiap sekolah dan madrasah dapat beroperasi pada tingkat minimal yang telah ditetapkan dalam standar. Sehingga SPM dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota c/q Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dalam melakukan seleksi, pelatihan, dan penempatan guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar, setiap Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi diri dan menyusun program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai SPM. Pemerintah

Kabupaten Kota (c/q Dinas Pendidikan), Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memahami indikator-indikator pemenuhan SPM yang berlaku di tingkat Kabupaten/Kota maupun sekolah, menganalisis data yang diperlukan, mendokumentasikan data-data itu ke dalam format yang memudahkan proses pengolahan dan analisisnya, mengidentifikasi gap (kesenjangan), dan menyusun program dan menghitung biaya yang diperlukannya. Dengan begitu, pada tahun 2014 diharapkan semua indikator SPM sudah dicapai.

SPM terdiri atas 27 indikator yang harus diwujudkan paling lambat tahun 2013. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok I adalah indikator SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kelompok II adalah indikator SPM yang menjadi tanggung jawab setiap SD/MI atau SMP/MTs.

Indikator SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ada sebanyak 14 indikator. Indikator ini mencakup beberapa jenis layanan, yaitu: (1) Sarana Prasarana, (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (3) Kurikulum, dan

(4) Penjaminan Mutu Pendidikan. Secara lengkap, indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1.
Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten Kota.

Jenis Layanan	IP-Nomor	Indikator
Sarana dan Prasarana	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.
	2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.
	3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
	4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan

		pendidikan.
	6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
	7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
	8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
	9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
	10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
	11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
	12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
Kurikulum	13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
Penjaminan Mutu Pendidikan	14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Indikator SPM yang menjadi tanggung jawab langsung SD/MI atau SMP/MTs sebanyak 14 indikator. Indikator ini mencakup beberapa jenis layanan, yaitu: (1) Sarana Prasarana, (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (3) Kurikulum, (4) Penilaian Pendidikan, (5) Penjaminan Mutu Pendidikan, dan (6) Manajemen Sekolah. Indikator yang menjadi tanggungjawab sekolah/madrasah sebenarnya juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama. Secara lengkap, indikator-indikator tersebut disajikan dalam Tabel 2. berikut.

Tabel 2.
Pelayanan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Jenis Layanan	IP-Nomor	Indikator
Sarana Prasarana	15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
	16	Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
	17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (<i>globe</i>), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.

	18	Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.
	19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: Kelas I – II : 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; atau Kelas VII – IX: 27 jam per minggu
Kurikulum	21	Satuan Pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
	22	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
Penilaian Pendidikan	23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
Penjaminan Mutu Pendidikan	24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
	25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
	26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan

		menyampai-kan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester
Manajemen Sekolah	27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib memenuhi SPM yang menjadi tanggungjawabnya. Demikian pula dengan sekolah, setiap sekolah (SD/MI dan SMP/MTs), negeri atau swasta, wajib memenuhi SPM yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada prinsipnya pencapaian SPM sekolah/madrasah sebenarnya juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu, seluruh Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memahami setiap indikator SPM yang menjadi tanggung jawab mereka. Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selanjutnya harus mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mengukur ketercapaian indikator. Selanjutnya, berdasarkan data yang terkumpul, mereka melakukan evaluasi diri apakah setiap indikator tersebut sudah berhasil dipenuhi atau belum.

Manakala belum tercapai, mereka wajib memprioritaskan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang dimilikinya untuk mencapai indikator yang masih belum terpenuhi tersebut. Terkait dengan SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (IP No 1 s/d IP No 14), ada data yang perlu diambil di sekolah/madrasah. Dengan demikian setiap sekolah (SD dan SMP) wajib menyampaikan laporan terkait dengan pemenuhan indikator tersebut kepada Dinas Pendidikan; sedangkan MI dan MTs menyampaikan laporan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat maupun ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Laporan tersebut akan digunakan sebagai masukan atau bukti dalam mengembangkan program dan kegiatan yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan minimal dalam bidang pendidikan. Sekolah/madrasah tidak dituntut untuk menggunakan seluruh sumber daya keuangan dan lainnya untuk memenuhi indikator SPM No. 1 sampai 14; Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab memenuhi indikator SPM No. 1 sampai 14.

3. Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat; 1985).

Beberapa pendapat ahli yang dikutip Abdulrahman (1997) mengemukakan bahwa :

1. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
2. Ateng Syarifuddin, mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
3. Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak mana diperoleh dari Pemerintah Pusat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Benyamin Hoesein (1993) bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar Pemerintah Pusat. Sedangkan Philip Mahwood (1983) mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah suatu Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh

Pemerintah guna mengalokasikan sumber sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beranjak dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu :

1. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka Pemerintahan Nasional.
3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

a. Dasar Hukum

Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni :

1) Undang - undang Dasar

Sebagaimana telah disebut di atas Undang - undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan Pemerintahan Pusat dan Daerah.

2) Ketetapan MPR-RI Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah :

Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Undang-Undang

Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal

B. Penelitian yang Relevan

Dalam melaksanakan penelitian perlu kiranya adanya suatu pembanding atau acuan tentang penelitian yang serupa, maka pada penelitian ini perlu dikemukakan dua penelitian tentang Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah yang sudah pernah dilakukan. Judul penelitian, nama peneliti, nama perguruan tinggi dan tahun pelaksanaan penelitian dari dua penelitian terdahulu yang dimaksud adalah :

1. Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah. (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Ngrambe Kabupaten Ngawi). Penelitian dilakukan oleh Bambang Suprptomo Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Wijaya Putra Surabaya Tahun 2009. Analisis Temuan yang didapat : Kebijakan yang diambil Kepala SMP Negeri 2 Ngrambe Kabupaten Ngawi dalam menetapkan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya adalah selalu berusaha menetapkan target sesuai atau di atas standar yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan

Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya. Kebijakan yang di ambil oleh kepala SMP Negeri 2 Ngrambe Kabupaten Ngawi dalam upaya memenuhi target Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya antara lain adalah aktif mengadakan pendekatan dan memberikan pengertian kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat tentang pentingnya kelancaran proses pendidikan di sekolah mereka demi masa depan peserta didik, memakai skala prioritas dalam pengadaan fasilitas sekolah untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran, berusaha mengajak masyarakat sekitar sekolah khususnya orang tua siswa untuk aktif membantu kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

2. Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah. (Studi Deskriptif SMA Negeri 4 Sidoharjo Kecamatan Soko Kabupaten Sidoharjo). Penelitian dilakukan oleh Harmiyanto Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Wijaya Putra Surabaya Tahun 2009. Analisis temuan yang didapat : faktor-faktor pendukung bagi SMA Negeri 4 Sidoharjo Kecamatan Soko Kabupaten Sidoharjo dalam upaya memenuhi target keterlaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya antara lain sebagai berikut (1) tersedianya materi kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal; (2) adanya

kecenderungan dari para orang tua siswa yang semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka; (3) tingginya kesadaran para guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; (4) pada umumnya sarana yang dimiliki oleh sekolah tersebut telah memenuhi standar minimal penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi pihak pengelola sekolah tersebut tinggal berusaha menjaga semua fasilitas agar tetap operasional dan berusaha untuk menambahnya; (5) telah terpenuhinya jumlah minimal pegawai seperti yang ditetapkan dalam SPM dan tersedia pedoman atau petunjuk teknis mengenai uraian tugas guru dan pegawai, yang memudahkan guru menyusun uraian tugas berdasarkan tugas yang diembannya; (6) adanya anggaran Pemerintah dan dukungan dana masyarakat berupa iuran komite sekolah; (7) tingginya kesadaran guru untuk konsisten menjalankan tugasnya; (8) adanya dukungan komite sekolah, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat untuk membantu kelancaran kegiatan pendidikan di sekolahnya.

Tabel 3.

Komparasi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No	Peneliti	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Bambang Suprptomo (2009)	Kualitatif	Menetapkan target keterlaksanaan Standar	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan	Perbedaan antara penelitian terdahulu

			Pelayanan Minimal Pendidikan	dua penelitian terdahulu adalah pada metode penelitian, dimana penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, seperti yang dilakukan kedua penelitian terdahulu.	dengan yang diteliti penulis saat ini adalah, dasar SPM yang digunakan penulis adalah Permendiknas No. 23 Tahun 2013 tentang SPM pendidikan dasar, dan lebih pada kaitannya dengan otonomi daerah
2	Harmiyanto (2009)	Kualitatif	Standar pelayanan minimal untuk mencapai peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		

Kesimpulan dari peneliti dalam menganalisis dari kedua penelitian terdahulu ialah Kebijakan yang diambil kepala sekolah dalam menetapkan target standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah menurut peneliti diatas adalah berusaha menetapkan target sesuai atau di atas standar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Dalam upaya memenuhi target terlaksananya standar pelayanan minimal di sekolah menurut peneliti terdahulu adalah :

1. Tersedianya materi kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal
2. Adanya kecenderungan bagi para orang tua sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

3. Adanya kesadaran para guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
4. Terpenuhi sarana yang dimiliki sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan

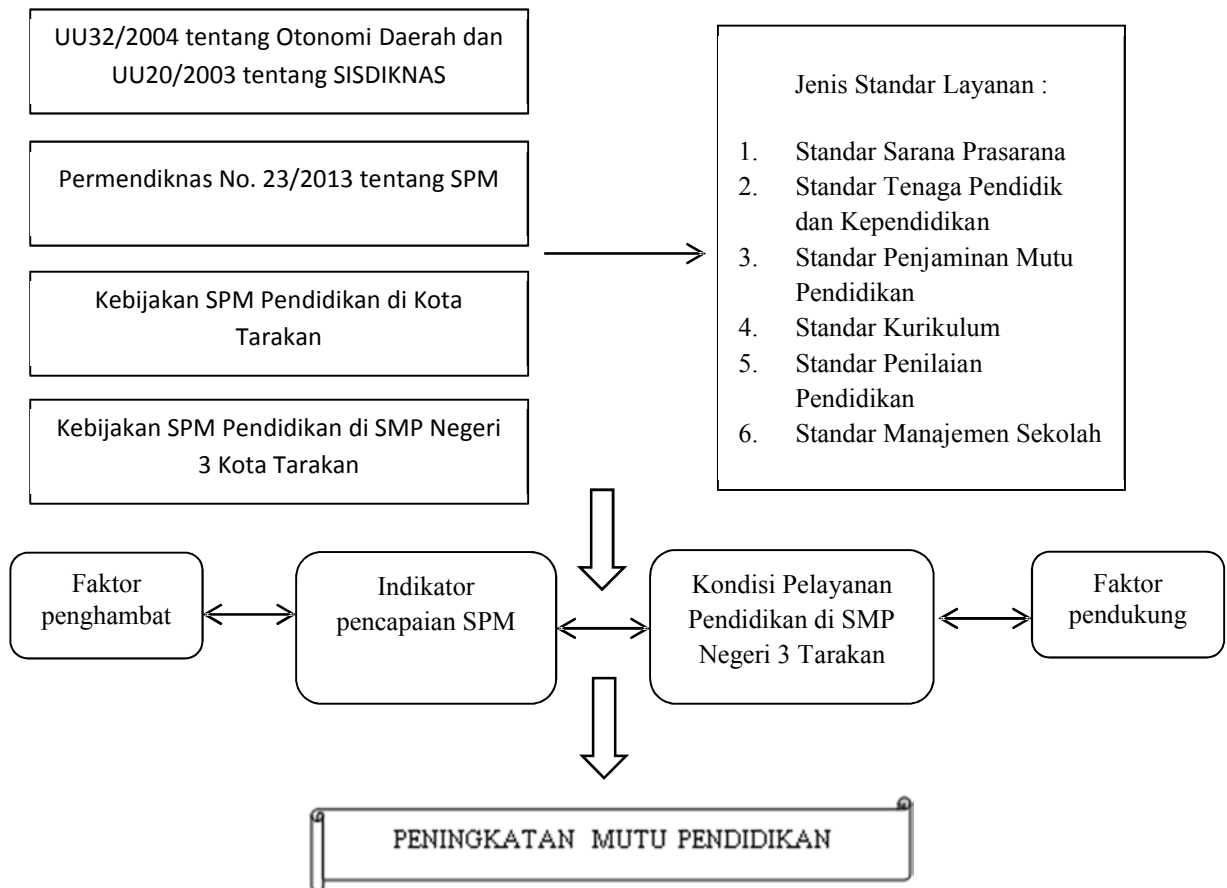
C. Kerangka Berpikir

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara serta ikut membiayainya. Sehingga setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Otonomi daerah meletakkan kewenangan seluruh urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai pada pengendalian. Pemerintah Pusat tidak berhak lagi campur tangan langsung dalam urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, akan tetapi berkonsentrasi pada perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Kerangka perundang-undangan yang baru di bidang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah) dan di bidang pendidikan (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional dengan

penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan.

SPM ini bisa dikatakan sebagai suatu strategi dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), karena indikator-indikator SPM ini diambil dari indikator-indikator SNP. Jika digambarkan maka akan berbentuk pola/gambar seperti berikut :

Gambar 1.
Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, muncul 8 (delapan) pertanyaan penelitian dalam rangka menjawab tujuan penelitian sebagai dasar untuk mengeksplorasi dan menggali lebih dalam terkait Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan pada era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Tarakan, khususnya pada tujuan mengetahui implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan disusun 6 (enam) pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk standar layanan sarana prasarana?
2. Bagaimana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk standar layanan pendidik dan tenaga kependidikan ?
3. Bagaimana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk standar layanan sarana prasarana?
4. Bagaimana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk standar layanan kurikulum?
5. Bagaimana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk standar layanan penjaminan mutu pendidikan?
6. Bagaimana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk standar layanan manajemen sekolah ?

Selanjutnya tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan, disusun 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Indikator pelayanan apa saja yang menjadi faktor pendukung Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Tarakan ?
2. Indikator pelayanan apa saja yang menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Tarakan ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Pemahaman lengkap mengenai metode deskriptif disampaikan oleh H. Nawawi (1990:63) yang menyebutkan bahwa penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian baik berupa seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain. Pada saat sekarang berdasarkan fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan atau kondisinya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pokok metode deskriptif antara lain meliputi :

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.

2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat (Nawawi, 1990:64).

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya ditentukan berdasarkan pendekatan yang dilakukan. Jika dilihat dari pendekatan yang dilakukan maka penelitian ini menggunakan metode penelitian naturalistic atau sering disebut dengan metode kualitatif namun akan diperkuat dengan data-data yang diperoleh melalui wawancara kepada para informan dan responden. Menurut Sugiyono (2001: 4), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Adapun pendekatan dalam analisis penelitian yang digunakan dengan analisis kualitatif, dimana diharapkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian diharapkan mampu mengetahui dan mengkaji kasus yang terjadi secara utuh.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Lincoln dan Gubah (1985: 200) mengemukakan bahwa pada paradigma alamiah (kualitatif) peneliti memulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis, sehingga dalam hal ini penelitian kualitatif sangat erat kaitanya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi maksud *sampling* dalam hal ini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber bangunannya (*construction*). Dengan demikian tujuannya

bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik, *sampling* juga dimaksudkan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sampel tersebut dapat memberikan informasi tentang segala suatu yang diperlukan, untuk pembatasan masalah ini dilakukan dengan memanfaatkan informan, dimana informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang diteliti.

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari informan awal sehingga dapat diperoleh informasi menurut pemahamannya. Dari beberapa informan awal ini memungkinkan ditemukan suatu kesenjangan yang mengancam prinsip kealamiah pada peristiwa tertentu yang terjadi. Sehingga membutuhkan informasi yang sekiranya dapat menutupi kesenjangan tersebut dengan terlebih dahulu meminta petunjuk-petunjuk informan awal bahwa siapa yang dapat memberikan informasi selanjutnya untuk mendukung kebenaran informasi awal atau bahkan memberikan informasi baru.

Lebih lanjut Sanafiah Faisal (1990:57) menjelaskan 3 tahap dapat dilakukan dalam penelitian, yaitu :

1. Pemilihan sampel awal, apakah informan (untuk diwawancarai) ataukah situasi sosial untuk diobservasi.

2. Pemilihan sampel lanjutan guna memperluas informasi dan melacak segenap variasi informasi yang mungkin ada.
3. Menghentikan pemilihan sampel lanjutan sekiranya sudah tidak muncul lagi informasi baru yang bervariasi dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Dengan demikian penelitian dengan pendekatan kualitatif jumlah sampel tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, karena dalam proses pengumpulan data bila variasi informasi tidak ditemukan lagi maka peneliti tidak perlu melanjutkannya dengan mencari informasi atau sampel baru (Sanafiah Faisal, 1990:57). Melihat hal tersebut penarikan sasaran ditentukan informan awal sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
- b) Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Tarakan
- c) Tenaga Pendidik SMP Negeri 3 Kota Tarakan
- d) Tenaga Kependidikan SMP Negeri 3 Kota Tarakan

C. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Kota Tarakan. Alasan peneliti memilih tempat ini ialah :

1. Kemudahan dalam pencarian data maupun informasi.
2. Karena alasan praktis operasional dengan pertimbangan waktu, biaya dan tenaga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggabungkan dan membandingkan antara data yang diperoleh dari metode observasi, wawancara mendalam, dan kajian dokumentasi untuk diperoleh informasi yang benar terkait fokus penelitian.

1. Metode Observasi

Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Tarakan, sewaktu kejadian tersebut berlaku sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.

2. Metode Wawancara

Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Tarakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua murid.

3. Kajian Dokumen (*document study*)

Kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari data-data sekunder yang berupa sumber-sumber tertulis dan foto-foto atau gambar. Metode kajian dokumen sangat diperlukan guna menambah objek temuan penelitian yang membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti dan juga guna untuk memperkuat hasil

penelitian. Kajian dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen untuk mendukung dan memperkuat hasil wawancara

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni mengabstraksikan secara teliti setiap informasi yang diperoleh, dalam arti setiap data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam dan data yang ada dianalisis secara rinci sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai. Bahwa terhadap data yang bersifat kualitatif yaitu yang digambarkan dengan data-data atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Suharsimi Arikunto, 1990: 107).

Selanjutnya untuk memahami dan mengkaji mengenai data-data yang diperoleh melalui kasus penelitian yang terjadi, penelitian mendasarkan pada logika analisa data menurut Miles and Huberman (1984:21-23) yang memaparkan 3 alur pemikiran. yakni:

1. Peringkasan data (*data reduction*). Data mentah diseleksi, disederhanakan dan diambil intinya. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian data (*data display*). Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan, tampilan data ini digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam organisasi. Miles and Huberman membatasi penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan data menuntut seorang peneliti mampu mentransformasikan data lisan menjadi tulisan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi atas pola keteraturan dan penyimpangan yang ada dalam fenomena tersebut, kemudian membuat prediksi atas kemungkinan selanjutnya. Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari seluruh konfigurasi penelitian berlangsung. Tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin terjadi begitu seksama dan memakan tenaga yang relatif besar. Dalam analisa ini, analisa data kualitatif merupakan upaya yang berkelanjutan, berulang dan terus menerus.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Menurut Gibbs (John Cresweel, 2010: 285), validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk

proyek-proyek yang berbeda. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2009). Pengujian keabsahan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengujian *Credibility*

Pengujian kredibilitas atau validitas internal. Dalam penelitian ini untuk meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, antara lain akan dilakukan dengan memperpanjang waktu pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian dan melakukan triangulasi, melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, teman sejawat, maupun pengecekan anggota (*member check*).

2. Pengujian *Transferability*

Transferability atau validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan hasil penelitian untuk diterapkan kepada populasi (digeneralisasikan). Dalam penelitian ini, *transferability* bergantung pada pemakaian hasil penelitian yang dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial tertentu. Untuk meningkatkan *transferability*, peneliti akan membuat laporan secara rinci, jelas, dan sistematis. Dengan demikian bagi orang lain yang ingin menggunakan hasil penelitian ini dapat memahami dengan jelas.

3. Pengujian *Dependability*

Pengujian *Dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian ini dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *Confirmability* di sebut juga uji objektivitas bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian ini, uji obyektivitas akan dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Baik itu dilakukan oleh auditor independen atau dosen pembimbing berkenan dengan proses penelitian mulai dari menentukan fokus masalah penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data, sampai menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Tarakan

Kota Tarakan berada di sebuah pulau kecil yang memiliki posisi strategis penggerak pertumbuhan wilayah utara dan pintu gerbang kedua bagi Kalimantan Timur sekaligus menjadi pusat transit perdagangan antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Selain itu, karena letaknya yang strategis ini pula, Kota Tarakan menjadi salah satu bagian dari Kota Segitiga Pertumbuhan yang selama ini dirintis dalam konteks BIMP-EAGA bersama dengan Tawau (Malaysia) dan Tawitawi. Segitiga tersebut diharapkan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekitar, khususnya bagi Nunukan, Bulungan, Malinau, Tana Tidung, dan Berau.

Kedudukan Strategis di ujung selat Makasar sebagai poros tengah kepulauan Nusantara dan penghubung jalur laut Asutralia-Oceania dengan Filipina serta Asia Timur merupakan salah satu nilai vital Tarakan. Kekayaan minyak bumi yang pada masanya bereputasi “*World Purest Oil*” juga menjadikan Tarakan sebagai obyek kepentingan internasional. Hal tersebut bermula dari ketika pada tahun 1896, sebuah perusahaan perminyakan Belanda, BPM (*Bataavishe Petroleum Maatchapij*) menemukan adanya sumber minyak di pulau ini. Banyak tenaga kerja didatangkan terutama dari Pulau Jawa seiring dengan meningkatnya kegiatan pengeboran. Mengingat fungsi dan

perkembangan wilayah ini, pada tahun 1923 Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk menempatkan seorang Asisten Residen di pulau ini yang membawahi 5 (lima) wilayah yakni; Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, Apau Kayan dan Berau. Namun pada masa pasca kemerdekaan, Pemerintah RI merasa perlu untuk merubah status kewedanan Tarakan menjadi Kecamatan Tarakan sesuai dengan Keppress RI No.22 Tahun 1963.

Letak dan posisi yang strategis telah mampu menjadikan kecamatan Tarakan sebagai salah satu sentra Industri di wilayah Kalimantan Timur bagian utara sehingga Pemerintah perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi Kota Administratif sesuai dengan PP No.47/1981. Status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan UU No.29/1997 yang peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menjadikannya sebagai Hari Jadi Kota Tarakan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Tarakan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk mendukung wilayah *hinterland*-nya yang kaya akan hasil hutan dan pertanian, perkebunan. Tarakan dapat dijadikan sebagai pusat industri pengelolaan hasil pertanian dan kehutanan serta distribusi barang dan jasa.

Pemerintah Kota Tarakan serius dalam pembangunan pendidikan, terutama dalam hal pembangunan gedung dan

peningkatan fasilitas sekolah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, pendidikan formal yang umumnya diselenggarakan di sekolah-sekolah tidak hanya dibawah oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) saja, tetapi ada juga yang dibawah oleh departemen di luar Depdiknas, misalnya Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dll. Jumlah SD/MI pada tahun ajaran 2009/2010 sebanyak 64 sekolah. Dari sebanyak 64 sekolah, 45 sekolah berstatus negeri dan 19 sekolah berstatus swasta. Jumlah sekolah terbanyak terdapat di Kecamatan Tarakan Tengah sedangkan jumlah sekolah paling sedikit terdapat di Kecamatan Tarakan Utara. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) tercatat sebanyak 20 sekolah, 11 sekolah merupakan sekolah negeri dan 9 sekolah merupakan sekolah swasta. Dari sebanyak 20 SMP/MTs di Kota Tarakan, 6 sekolah berada di Kecamatan Tarakan Timur, 8 sekolah berada di Kecamatan Tarakan Tengah, 4 sekolah berada di Kecamatan Tarakan Barat dan 2 sekolah berada di Kecamatan Tarakan Utara.

Sekolah Menengah Atas dan sederajat pada ajaran tahun 2009/2010 terdapat sebanyak 19 sekolah. Dari 19 sekolah tersebut, 7 sekolah merupakan sekolah negeri dan 12 sekolah merupakan sekolah swasta. Jumlah sekolah terbanyak terdapat di Kecamatan Tarakan Tengah dan jumlah sekolah paling sedikit terdapat di Kecamatan Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Perguruan Tinggi di Kota Tarakan

ada 6 unit yang terdiri dari universitas 1 unit, sekolah tinggi 1 unit dan akademi sebanyak 4 unit. Dari enam perguruan tinggi tersebut hanya satu yang berstatus perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Borneo Tarakan. *(data Dinas Pendidikan Kota Tarakan)*

2. Gambaran Umum SMP Negeri 3

a. Profil SMP Negeri 3 Tarakan

Tabel 4.

Profil SMP Negeri 3 Tarakan

Nama Sekolah	SMP Negeri 3
Alamat Sekolah	Jalan Sungai Brantas Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara
No Telp	(0551) 22862/
Fax	(0551) 30031
Url/Website	smpn3trk.sch.id
Akreditasi Sekolah	“ A “
Nomor Identitas Sekolah	20.006.0
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	201166201006
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	30401702
Tahun Berdiri	1982
Nomor SK	0299/O/1982
Tanggal SK	9 Oktober 1982

Sumber : SMP Negeri 3 Tarakan

b. Sejarah SMP Negeri 3 Tarakan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini beralamatkan di Jalan Sungai Berantas Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. SMP Negeri 3 Tarakan merupakan SMP Negeri

tertua di wilayah kecamatan Tarakan Timur yang dibangun Pemerintah. SMP ini lahir pada tanggal 9 Oktober 1982 berdasarkan SK pendirian No.0299/O/1982 dan terletak diatas lahan seluas 10.859 m².

Di awal-awal kelahirannya, sekolah ini hanya mempunyai siswa angkatan pertama yang proses belajar mengajarnya masih bergabung dengan SMP Negeri 1 Tarakan. Ini dikarenakan pembangunan gedung sekolah yang belum rampung. Semenjak tahun 1983 hingga tahun 2006, SMP Negeri 3 Tarakan telah memiliki gedung 1 lantai yang representatif, yang dapat digunakan untuk menampung proses belajar mengajar seluruh siswa SMP 3.

Namun dalam perjalanannya, tepat pada tanggal 28 April 2006 malam pukul 20:00 WITA, SMP Negeri 3 Tarakan mengalami musibah kebakaran. Kebakaran tersebut membumi hanguskan seluruh fasilitas dan ruangan vital termasuk ruang kelas yang ludes terbakar. Akibatnya, proses belajar mengajar pun menjadi terganggu dan sementara proses KBM menggunakan gedung SMAN 2 dan belajar disiang hari. Agar kegiatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Tarakan kembali normal, Pemerintah Kota Tarakan segera bertindak cepat untuk melakukan perbaikan dengan membangun gedung dan ruang-ruang kelas yang baru. Akhirnya oleh Pemerintah, dibangunlah gedung baru 3 lantai yang selesai pada tahun 2009.

Sejak saat itu, peningkatan mutu SMP Negeri 3 Tarakan memiliki fasilitas yang lebih bagus dan lengkap, sehingga membuat sekolah tampak megah yang bisa menampung lebih banyak lagi siswa. Hal tersebut dapat dicapai, berkat kerja keras, semangat, dan kegigihan guru SMP 3 dalam membina para siswanya.

SMP Negeri 3 Tarakan telah tercatat sebagai sekolah unggulan di Kota Tarakan. Berbagai prestasi telah diraih, baik prestasi akademik dan non akademik ditingkat kota, provinsi, dan nasional, bahkan saat ini, SMP Negeri 3 Tarakan telah berupaya meningkatkan mutu layanan dibidang pendidikan serta meningkatnya prestasi sekolah dan prestasi pesertadidiknya dan sekolah kembali terakreditasi dengan predikat: A.

B. Analisis Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Oleh Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan di SMP Negeri 3 Tarakan

Pemerintah telah mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka menjamin terwujudnya pendidikan bermutu di Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013. SPM ini memberikan penegasan tentang layanan pendidikan yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. SPM ini bisa dikatakan sebagai suatu strategi dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), karena indikator-

indikator SPM ini diambil dari indikator-indikator SNP. Ada 6 jenis Standar Pelayanan yang wajib dipahami dan diimplementasikan oleh Kabupaten/Kota Dan satuan pendidikan. Diantaranya ialah sebagai berikut:

Tabel 5.
Analisis Pelayanan Pendidikan oleh Kabupaten Kota dan Satuan Pendidikan

NO	JENIS	INDIKATOR PELAYANAN	
		KABUPATEN/KOTA	SATUAN PENDIDIKAN
1	Sarana Prasarana	1. Keterjangkauan Satuan pendidikan 2. Jumlah Siswa dalam setiap Rombongan Kelas dan Kelengkapan Kelas 3. Ketersediaan ruang laboratorium IPA	1. Ketersediaan buku teks pelajaran 2. Ketersediaan buku pengayaan dan buku referensi 3. Jam kerja guru tetap di satuan pendidikan
2	Pendidik dan tenaga kependidikan	1. Ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran 2. Kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik guru 3. Kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik guru untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris 4. Kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik Kepala Sekolah	1. Jam proses pembelajaran di satuan pendidikan

		5. Kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik pengawas sekolah	
3	kurikulum	1. Kegiatan Pemerintah Daerah dalam membantu satuan pendidikan	1. Penerapan kurikulum di satuan pendidikan 2. Guru yang menerapkan RPP di satuan pendidikan
4	Penjaminan mutu pendidikan	1. Kegiatan kunjungan pengawas ke satuan pendidikan	1. Kegiatan supervise kepala sekolah 2. Laporan evaluasi guru 3. Pelaporan hasil pendidikan peserta didik
5	Penilaian pendidikan		1. Pengembangan dan penerapan program penilaian oleh guru
6	Manajemen sekolah		1. Penerapan prinsip prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Sumber : Permendiknas No 23 Tahun 2013

Dari Tabel 5 diatas maka dapat dianalisis enam standar pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan. Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sarana Prasarana

a. Keterjangkauan Jarak Satuan Pendidikan

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 3 Tarakan, Bapak Soib, M.PD tentang keterjangkauan jarak sekolah

dengan pemukiman, beliau mengutarakan bahwa:

“Tidak ada masalah dengan jarak antara rumah dengan sekolah, karena hampir semua siswa kami berasal dari wilayah dekat sekolah”.

Hal senada juga diutarakan oleh Waka Humas Ibu Halida , beliau mengatakan bahwa tidak ada masalah antara jarak rumah siswa dengan sekolah, jikapun ada siswa yang bertempat tinggal jauh dari sekolah akan tetap terjangkau dengan transportasi.

b. Jumlah Siswa dalam setiap Rombongan Kelas dan Kelengkapan Kelas

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/Mts tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.

Tabel 6.

Jumlah Siswa Dalam Setiap Rombongan Kelas (Rombel)

NO	KELAS	SISWA			SISWA		
		JULI			AGUSTUS		
		L	P	JML	L	P	JML
1	VII - 1	18	16	34	18	16	34
2	VII - 2	17	17	34	17	17	34
3	VII - 3	17	18	35	17	18	35
4	VII - 4	19	15	34	19	14	33
5	VII - 5	18	18	36	18	18	36
6	VII - 6	18	17	35	18	17	35
7	VII - 7	18	17	35	19	16	35
8	VII - 8	9	22	31	9	22	31
9	VII - 9	14	18	32	14	18	32
JUMLAH		148	158	306	149	156	305
1	VIII - 1	11	21	32	11	21	32
2	VIII - 2	15	17	32	15	17	32

3	VIII - 3	16	15	31	16	14	30
4	VIII - 4	14	18	32	14	18	32
5	VIII - 5	16	16	32	15	17	32
6	VIII - 6	17	14	31	18	14	32
7	VIII - 7	19	12	31	19	12	31
8	VIII - 8	8	17	25	7	17	24
9	VIII - 9	7	18	25	7	18	25
JUMLAH		123	148	271	122	148	270
1	IX - 1	11	12	23	11	12	23
2	IX - 2	14	12	26	12	12	24
3	IX - 3	12	12	24	12	12	24
4	IX - 4	12	13	25	12	13	25
5	IX - 5	13	11	24	13	10	23
6	IX - 6	13	11	24	12	10	22
7	IX - 7	11	13	24	11	12	23
8	IX - 8	12	11	23	11	12	23
9	IX - 9	11	13	24	8	14	22
JUMLAH		109	108	217	102	107	209

Sumber : Data SMP Negeri 3 Tarakan (2013)

Dari Tabel 6 menunjukkan bahwa untuk kelas VII, VIII, IX semua siswa per rombongan belajar tidak ada yang melebihi 36 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa per rombongan belajar telah memenuhi SPM

Pada jumlah ketersediaan meja, kursi, meja guru, kursi guru, dan papan tulis di setiap ruang kelas telah sesuai dengan SPM. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Agus Salim selaku wakasek sarana prasarana yang mengatakan seperti ini:

“Di sekolah ini menggunakan sistem moving class, jadi kelas-kelas yang ada tidak menyesuaikan dengan banyaknya rombel yang ada tetapi mengikuti banyaknya jumlah mata pelajaran. Dan ditiap ruang

kelas tersebut ketersediaan meja dan kursi siswa lebih dari cukup, serta meja dan kursi guru pasti ada”

c. Ketersediaan Laboratorium IPA

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

Untuk ketersediaan meja dan kursi, kapasitas ruangan telah sesuai dengan SPM sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Nunik selaku penanggung jawab laboratorium yang mengatakan sebagai berikut:

“Untuk laboratorium ipa di SMP Negeri 3 dibagi menjadi dua mas, ada lab fisika dan lab biologi. Jumlah kursi dan meja mencukupi untuk semua siswa yang belajar di lab tidak pernah kelebihan kapasitas. Peralatan lab kita juga sudah sangat lengkap. Hanya sedikit yang rusak, seperti stopwatch, dan pipet karena pecah saat praktek.”

d. Ketersediaan Ruang Guru dan Kelengkapannya

Pada jumlah ketersediaan ruang guru, meja, kursi pendidik dan tenaga kependidikan, menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Kota Tarakan mulai dari ketersediaan ruang guru, meja, kursi pendidik dan tenaga kependidikan sudah ada. Untuk ruang kepala sekolah sudah terpisah dengan ruang guru lengkap dengan ruang tamu.

e. Ketersediaan buku teks

Pada ketersediaan buku teks setiap SMP/MTS menyediakan buku teks mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set

untuk setiap peserta didik. Kelas 7 sebanyak 305 siswa, kelas 8 sebanyak 270 siswa, dan kelas 9 sebanyak 209 siswa.

Tabel 7.
Ketersediaan Buku Teks

No	Mata Pelajaran	jumlah buku teks					
		kelas 7	SPM	kelas 8	SPM	kelas 9	SPM
1	Matematika	265	X	254	X	224	Y
2	Ilmu pengetahuan alam	226	X	280	Y	209	Y
3	Bahasa Indonesia	220	X	277	Y	224	Y
4	Bahasa Inggris	248	X	209	X	210	Y
5	Pkn	265	X	265	X	210	Y
6	Prakarya	225	X	277	X	208	X
7	Penjaskes	219	X	288	Y	209	Y
8	Seni budaya	225	X	277	Y	209	Y
9	Agama	229	X	213	X	166	X
10	Ilmu pengetahuan sosial	248	X	215	Y	215	

Sumber Data SMP Negeri 3 Tarakan
Keterangan:

X: Belum terpenuhi

Y: Sudah terpenuhi

Dari Tabel 7 menunjukkan di SMP Negeri 3 Tarakan, pada kelas 7, ketersediaan buku teks seluruh mata pelajaran tidak memenuhi SPM. Pada kelas 8, ketersediaan buku teks matematika, bahasa Inggris, Pkn, prakarya, dan agama tidak memenuhi SPM, sedangkan ketersediaan buku teks ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, penjaskes, dan seni budaya sudah memenuhi SPM. Pada kelas 9, ketersediaan buku teks yang tidak memenuhi SPM ialah buku prakarya dan agama.

Dari data di atas, semua kelas masih ada kesenjangan terhadap ketersediaan buku teks pelajaran. Kendala dalam hal ketersediaan buku

teks pelajaran menurut Ibu Desi Apriani selaku kepala perpustakaan ialah pada proses pengadaan buku terutama untuk kelas 7 yang masih kurang, selain itu menurut ibu Evy selaku Waka Kurikulum adalah pada proses pemeliharannya, dimana sebenarnya jumlah buku teks pelajaran untuk tiap siswa telah lengkap, terkecuali untuk kelas 7 yang masih belum terpenuhi. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Dari pihak CV pengadaan mungkin tengah semester ini semua buku sudah teralokasi di sekolah. Sebagai penggantinya buku buku tersebut dipakai satu buku untuk dua orang. Namun bisa juga kedisiplinan dalam menjaga buku teks oleh anak anak sering terabaikan.”

Selanjutnya menurut Ibu Evy:

“Kendala yang kami rasakan dalam hal ketersediaan buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah bahwa masih ada keraguan apakah buku harus dibagi ke siswa untuk di bawa pulang atau hanya dipinjamkan saat pelajaran berlangsung”.

Senada dengan pendapat di atas, Ibu Halida, Waka Humas SMP Negeri 3 Tarakan mengatakan bahwa kendala yang dihadapi berkenaan dengan hal tersebut di atas adalah sosialisasi baik pada peserta didik, orang tua peserta didik, serta komite sekolah tentang bagaimana seharusnya buku yang ada disekolah dimanfaatkan.

f. Ketersediaan buku pengayaan dan buku referensi.

Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. Dari data SMP Negeri 3 Tarakan, untuk ketersediaan buku pengayaan dan buku referensi dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.
Ketersediaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi

Nama sekolah	Buku Pengayaan		Buku Referensi	
	Jumlah Judul	Jumlah Buku	Jumlah Judul	Jumlah Buku
SMP Negeri 3	729	2150	178	1780

Sumber: Data SMP Negeri 3 Tarakan

Dari Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa jumlah judul buku pengayaan dan jumlah judul buku referensi telah memenuhi SPM

g. Jam Kerja Guru Tetap per minggu di Satuan Pendidikan

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan

Tabel 9.
Jam Kerja Guru Tetap Perminggu Di SMP Negeri 3 Tarakan

No	Nama sekolah	Jumlah Guru tetap	Jam kerja Guru per minggu
1	SMP Negeri 3	38	41

Sumber: Data SMP Negeri 3 Tarakan

Tabel 9 diatas menunjukkan jam kerja guru tetap di SMP Negeri 3 telah memenuhi SPM.

Berdasarkan paparan diatas tentang Standar Sarana Prasarana dapat

disimpulkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10.

Capaian Indikator Standar Pelayanan Sarana Prasarana

No	Standar layanan	Indikator	Kondisi di sekolah
1	Sarana Prasarana	a. Keterjangkauan Jarak	a. Terpenuhi
		b. Jumlah peserta didik	b. Terpenuhi
		c. Ketersediaan ruang guru	c. Terpenuhi
		d. Ketersediaan buku teks	d. Tidak terpenuhi
		e. Ketersediaan peraga IPA	e. Terpenuhi
		f. Ketersediaan buku pengayaan dan referensi	f. Terpenuhi
		g. Jam kerja guru	g. Terpenuhi

Dari Tabel 10 diatas dapat kita lihat bahwa seluruh indikator pada standar sarana dan prasarana belum semuanya terpenuhi, terutama pada indikator ketersediaan buku teks

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Ketersediaan guru di setiap satuan pendidikan

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

Tabel 11.

Ketersediaan Guru di SMP Negeri 3

No	Bidang Studi	Ketersediaan guru
1	Agama Islam	2
2	Agama Kristen	1
3	PPKn	3
4	Bahasa Indonesia	4
5	Matematika	5
6	IPA	5
7	IPS Terpadu	7
8	Penjaskes	2
9	Bahasa Inggris	4
10	TIK	1
11	Mulok/Prakarya	1
12	BK	2
13	Seni Budaya	1

Sumber: Data SMP Negeri 3 Tarakan

Dari data Tabel 11 menunjukkan kebutuhan guru rasio 1:1 sudah terpenuhi. Dengan begitu ketersediaan guru di satuan pendidikan sudah memenuhi SPM.

b. Ketersediaan guru berkualifikasi dan bersertifikat pendidik

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%

Tabel 12.

Ketersediaan Guru Berkualifikasi dan Bersertifikat Pendidik di SMP
Negeri 3 Tarakan

No	Nama sekolah	Guru dan Tenaga Kependidikan									
			Guru (- kepsek)						Kepsek		
		Jumlah Guru	Pendidikan						Pendidikan		
			S2		S1/D4		D3		>S1/D4+SP	D3	
			S2	+Sert Pend	S1/D4	+Sert Pend	D3	+Sert Pend			>S1/D4
1	SMP N 3	38	1	1	37	35	0	0		1	

Sumber: Data SMP Negeri 3 Tarakan

Dari data Tabel 12 menunjukkan ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S1 ata D-IV sebanyak 100% dan bersertifikasi sebanyak 94%. Dengan demikian ketersediaan guru berkualifikasi dan bersertifikat pendidik di SMP Negeri 3 telah memenuhi SPM.

- c. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Guru untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Tabel 13.

Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Guru

Mata Pelajaran	Jumlah Guru S1/D4 (Sertifikat Pendidik)
matematika	4
IPA	5
Bahasa Indonesia	3
Bahasa Inggris	4

Sumber: Data SMP Negeri 3 Tarakan

Dari data Tabel 13 menunjukkan ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris telah memenuhi SPM.

d. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Kepala Sekolah

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Kepala SMP Negeri 3 Tarakan ialah Bapak Soib M.Pd merupakan lulusan S2 Jurusan Administrasi Pendidikan dan bersertifikat pendidik dalam mata pelajaran IPA. Dengan demikian ketersediaan kepala sekolah berkualifikasi pendidikan S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidikan di SMP Negeri 3 Tarakan telah memenuhi SPM

e. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Pengawas Sekolah

Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah sertifikat pendidik.

Tabel 14.

Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Pengawas Sekolah

No	Nama sekolah	Tenaga Kpdk	Jumlah Guru	Pendidikan Pengawas		
				>S1/D4	>S1/D4+SP	D3
1	SMP N 3	32	38	-	1	-

Sumber: Data SMP Negeri 3 Tarakan

Dari data Tabel 14 menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Kota Tarakan, ketersediaan pengawas sekolah berkualifikasi pendidikan S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidikan telah memenuhi SPM.

f. Jam Proses Pembelajaran di Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran 27 jam per minggu.

Tabel 15.

Jam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 3 Tarakan

Kelas	jam per minggu
VII	38
VIII	39
IX	39

Sumber: Data SMP Negeri 3 Tarakan

Dari data Tabel 15 menunjukkan bahwa pada kelas VII jam perminggu selama 38 Jam, Pada kelas VIII selama 39 Jam, dan Pada Kelas IX selama 39 Jam. Dengan Demikian penyelenggaraan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan pembelajaran Kelas VII-IX selama 27 jam per minggu telah terpenuhi.

Berdasarkan paparan diatas tentang Standar pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan, maka dapat disimpulkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 16.

Capaian Standar Pelayanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

No	Standar layanan	Indikator	Kondisi di sekolah
2	Pendidik dan tenaga kependidikan	a. ketersediaan guru	a. Terpenuhi
		b. kualifikasi akademik, sertifikat guru	b. Terpenuhi
		c. kualifikasi guru untuk mata pejaran MTK, IPA, bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	c. Terpenuhi
		d. kualifikasi akademik, sertifikat pendidik kepala sekolah	d. Terpenuhi
		e. kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik pengawas sekolah	e. Terpenuhi
		f. jam proses pembelajaran	f. Terpenuhi

Dari Tabel 16 diatas dapat kita lihat bahwa seluruh indikator pada standar pendidik dan tenaga kependidikan telah memenuhi SPM.

3. Kurikulum

a. Kegiatan Pemerintah Daerah dalam Membantu Satuan Pendidikan

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah Bapak Soib M.Pd, menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan telah mendukung satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Hal ini di dukung oleh Waka Humas Ibu Halidah S.Pd yang menyatakan bahwa peran Dinas Pendidikan dalam membantu mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif telah berjalan dengan baik.

b. Penerapan Kurikulum Satuan Pendidikan

Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus dan rencana program pembelajaran (RPP).

Prinsip-prinsip, metode, dan langkah pengembangan KTSP merujuk pada Permendiknas nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, Permendiknas 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, serta Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari hasil wawancara dengan Waka Kurikulum Ibu Evy, beliau mengatakan bahwa sekolah mereka telah melaksanakan kurikulum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SPM pendidikan dasar dan walaupun telah dikeluarkan kurikulum tahun 2013, namun sekolah mereka masih menggunakan kurikulum KTSP, dan pada tahun 2014 sudah menggunakan kurikulum 2013.

c. Guru yang menerapkan RPP di Satuan Pendidikan

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. Silabus adalah acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Tabel 17.

Guru yang Menerapkan RPP di SMP Negeri 3 Tarakan

Nama Sekolah	Jumlah Guru yang Memiliki Silabus	Jumlah Guru yang Memiliki RPP	Jumlah Guru yang RPPnya sesuai silabus	Jumlah Guru yang Menerapkan RPP	Jumlah Guru yang menerapkan RPP berdasar silabus
SMP N 3	38	38	38	-	-

Sumber: Data Sekunder SMP Negeri 3 Tarakan

Dari data Tabel 17 menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan yang memiliki RPP berdasarkan silabus sebanyak 38 guru. Namun pada kenyataannya, tidak semua guru dapat menerapkan RPP berdasarkan silabus, banyak ditemukan adanya improvisasi terutama pada guru-guru

lama karena pada dasarnya mereka tidak terlalu paham penerapan RPP.

Berdasarkan paparan diatas tentang standar pelayanan kurikulum dapat disimpulkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 18.

Capaian Standar Pelayanan Kurikulum

No	Standar layanan	Indikator	Kondisi di sekolah
3	Kurikulum	a. Kegiatan pemda dalam membantu satuan pendidikan	a. Terpenuhi
		b. Penerapan kurikulum	b. Terpenuhi
		c. Guru yg menerapkan RPP	c. Tidak Terpenuhi

Dari Tabel 18 dapat kita lihat bahwa seluruh indikator pada standar penjaminan mutu pendidikan belum terpenuhi terutama pada indikator Guru yang menerapkan RPP.

4. Penjaminan Mutu Pendidikan

a. Kegiatan Kunjungan Pengawas ke Satuan Pendidikan

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Dari hasil wawancara dengan Waka Humas SMP Negeri 3 Tarakan Ibu Halida, Ia mengatakan bahwa kegiatan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan dalam 1 bulan biasanya lebih dari 1 kali jika ada hal-hal yang perlu diinformasikan, namun untuk setiap kunjungannya tidak selalu tetap minimal 3 jam, bahkan seringkali kurang dari 3 jam.

b. Kegiatan Supervisi Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sardina Guru IPA Biologi menyatakan bahwa kepala sekolah telah memberikan supervisi kelas paling sedikit 2 kali dalam satu semester dan telah memberikan umpan balik pada guru-guru di SMP Negeri 3 Tarakan. Pernyataan ini didukung oleh Ibu Aminah, seorang guru Agama dan Bapak Bernadus seorang guru Sejarah yang menyatakan di sekolah mereka, proses supervisi dan umpan balik dari kepala sekolah kepada mereka sudah berjalan sesuai dengan standar yang ada.

c. Laporan Evaluasi Guru di Satuan Pendidikan

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar peserta didik.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aminah tentang laporan evaluasi guru, disekolah mereka setiap guru telah menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester. Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Nelly menunjukkan bahwa guru-guru di sekolah mereka selalu melaporkan hasil evaluasi pelajaran dan hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah. Hal ini didukung oleh Ibu Irawati dan Bapak Eris Arko yang melihat bahwa pelaksanaan pelaporan evaluasi

terhadap anak didik selalu dilaporkan kepada kepala sekolah.

d. Pelaporan pendidikan peserta didik

Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semester.

Dari hasil wawancara dengan Waka Humas Ibu Halida, beliau mengatakan sebagai berikut:

"Kami selalu melaporkan hasil penilaian pendidikan peserta didik kami pada orang tua peserta didik, baik itu semester, kenaikan kelas maupun hasil ujian nasional".

Hal ini diperkuat oleh Waka Kurikulum Ibu Evy yang menyatakan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi sekolah untuk memberikan laporan tentang hasil evaluasi pembelajaran di sekolah kepada para bapak/Ibu murid, selain itu perkembangan sikap siswa di sekolah mendapat perhatian yang serius dari sekolah.

Berdasarkan paparan diatas tentang standar pelayanan penjaminan mutu pendidikan dapat disimpulkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 19.

Capaian Standar Pelayanan Penjaminan Mutu Pendidikan

No	Standar layanan	Indikator	Kondisi di sekolah
4	Penjaminan mutu pendidikan	a. Kegiatan kunjungan pengawas	a. Tidak Terpenuhi

		b. Supervisi kepala sekolah	b. Terpenuhi
		c. Laporan evaluasi guru	c. Terpenuhi
		d. Pelaporan pendidikan peserta didik	d. Terpenuhi

Dari Tabel 19 diatas dapat kita lihat bahwa seluruh indikator pada standar penjaminan mutu pendidikan belum terpenuhi, terutama pada indikator kegiatan kunjungan pengawas.

5. Penilaian Pendidikan

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

Cakupan indikator ini meliputi penilaian formatif dan sumatif, proses dan hasil belajar peserta didik, dan upaya-upaya guru/pendidik mengembangkan kemampuan peserta didik. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan meliputi pengembangan instrumen, penentuan metode penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan penentuan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kurikulum, Ibu Evi, ia mengatakan bahwa penilaian pendidikan di SMP Negeri 3 Tarakan dilakukan melalui sebuah diskusi khusus seperti rapat yang membahas penilaian pendidikan agar ada kesamaan pada tiap guru dalam menerapkan penilaian pendidikan, baik dari pengembangan instrument,

metode penilaian sampai pada pengolahan hasil penilaian pendidikan.

6. Manajemen Sekolah

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sekolah dikatakan telah memiliki rencana tahunan sekolah paling tidak jika dokumen tersebut berisi rencana anggaran dan pemeliharaan fasilitas sekolah (sekarang dinamakan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/RKAS).

Dari hasil wawancara dengan Waka Humas, Ibu Halida, beliau mengatakan bahwa manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan hal itu sudah dilakukan di SMP Negeri 3 Tarakan. Hal ini didukung oleh Waka Sarana dan Prasarana, Bapak Agus, beliau mengatakan bahwa melalui gagasan MBS, kepercayaan kepada kepala sekolah dan dewan sekolah untuk menentukan cara mencapai sasaran pendidikan di masing-masing sekolah harus dipenuhi. Penting artinya memiliki kesepakatan tertulis yang memuat secara rinci peran dan tanggung jawab Dewan Pendidikan Daerah, Dinas Pendidikan Daerah, Kepala Sekolah, dan Dewan Sekolah. Kesepakatan itu harus dengan jelas menyatakan standar yang akan dipakai sebagai dasar penilaian

akuntabilitas sekolah. Setiap sekolah perlu menyusun laporan kinerja tahunan seperti yang dikatakan oleh beliau seperti ini:

“Seberapa baik kinerja sekolah dalam upayanya mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana sekolah menggunakan sumber dayanya, dan apa rencana selanjutnya.”.

Selanjutnya Bapak Soib, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tarakan menyatakan bahwa Konsep MBS merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi dalam pemerintahan. Dimana sekolah dipandang harus mampu melihat masalah mereka sendiri dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada.

C. Pembahasan Hasil Penelitian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMP Negeri 3 Tarakan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMP 3 Tarakan dapat dinilai dengan cara membandingkan keseluruhan indikator dari standar pelayanan pendidikan dengan kondisi di sekolah.

Tabel 20.

Perbandingan Indikator Pelayanan dengan Kondisi di Sekolah

No	Standar layanan	Indikator	Kondisi di sekolah
1	Sarana Prasarana	a. Keterjangkauan Jarak b. Jumlah peserta didik c. Ketersediaan ruang guru d. Ketersediaan buku teks e. Ketersediaan peraga IPA f. Ketersediaan buku pengayaan dan referensi g. Jam kerja guru	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi d. Tidak terpenuhi e. Terpenuhi f. Terpenuhi g. Terpenuhi
2	Pendidik dan tenaga kependidikan	a. ketersediaan guru b. kualifikasi akademik, sertifikat guru c. kualifikasi guru untuk mata pejaran MTK, IPA, bahasa Indonesia, dan	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi d. Terpenuhi e. Terpenuhi f. Terpenuhi

		Bahasa Inggris d. kualifikasi akademik, sertifikat pendidik kepala sekolah e. kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik pengawas sekolah f. jam proses pembelajaran	
3	Kurikulum	a. Kegiatan pemda dalam membantu satuan pendidikan b. Penerapan kurikulum c. Guru yg menerapkan RPP	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Tidak terpenuhi
4	Penjaminan mutu pendidikan	a. Kegiatan kunjungan pengawas b. Supervisi kepala sekolah c. Laporan evaluasi guru d. Pelaporan pendidikan peserta didik	a. Tidak Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi d. Terpenuhi
5	Penilaian pendidikan	-	Terpenuhi
6	Manajemen sekolah	-	Terpenuhi

Dari Tabel 20 diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sarana Prasarana

a. Keterjangkauan Jarak Satuan Pendidikan

Hasil temuan penelitian menunjukkan tidak ada masalah dengan jarak antara rumah dengan sekolah, karena hampir semua siswa berasal dari wilayah dekat sekolah, walaupun ada yang jarak rumah peserta didik yang lebih dari 3 km, tetap terjangkau dengan transportasi.

b. Jumlah Siswa dalam setiap Rombongan Kelas dan Kelengkapan Kelas

Hasil temuan penelitian menunjukkan di SMP Negeri 3 Tarakan, dari 9 rombongan kelas, jumlah siswa pada seluruh rombongan

belajarnya tidak ada yang melebihi 36 siswa.

Hasil temuan penelitian pada jumlah ketersediaan meja, kursi, meja guru, kursi guru, dan papan tulis di setiap ruang kelas, menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, ketersediaan meja, kursi, meja guru, kursi guru, dan papan tulis telah sesuai dengan SPM.

c. Ketersediaan Ruang Guru dan Kelengkapannya

Hasil temuan penelitian pada jumlah ketersediaan ruang guru, meja, kursi pendidik dan tenaga kependidikan, menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, ketersediaan ruang guru, meja, kursi pendidik dan tenaga kependidikan telah sesuai dengan SPM.

d. Ketersediaan Buku Teks Pelajaran

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, pada kelas 7, ketersediaan buku teks semua mata pelajaran tidak mencukupi untuk tiap siswa. Pada kelas 8, ketersediaan buku teks Matematika, Bahasa Inggris, Pkn, prakarya, dan Agama tidak mencukupi, dan pada kelas 9, ketersediaan buku teks prakarya dan agama tidak memenuhi SPM.

e. Ketersediaan Peraga IPA

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, ketersediaan alat peraga IPA sudah memenuhi SPM.

f. Ketersediaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3,

ketersediaan buku pengayaan dan buku referensi telah memenuhi SPM.

g. Jam Kerja Guru Tetap di Satuan Pendidikan

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, rata rata jam kerja guru tetap adalah 41 jam per minggu, sedangkan pada ketentuan di SPM, jumlah jam kerja guru tetap di satuan pendidikan adalah 37,5 jam per minggu, sehingga telah melebihi apa yang telah ditentukan oleh SPM

Dari hasil temuan penelitian pada implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan, untuk standar sarana dan prasarana menunjukkan bahwa masih ada beberapa SPM yang belum dapat dipenuhi oleh SMP Negeri 3 Tarakan yaitu ketersediaan buku teks pelajaran. Karena fasilitas pendidikan merupakan sarana dasar yang diperlukan dalam program pendidikan dan merupakan salah satu fasilitas sosial yang penting bagi penduduk, maka ketercukupan fasilitas pendidikan yang menyangkut sarana dan prasarana akan sangat menunjang keberhasilan program pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) menyebutkan bahwa pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu

pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Permendiknas ini semakin mengukuhkan pentingnya peran sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan dalam menyokong peningkatan mutu pendidikan nasional.

Hal ini sesuai dengan pendapat Budi Winarno (2002) yang menjelaskan implementasi kebijakan sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Ketersediaan Guru pada Satuan Pendidikan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, ketersediaan 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran telah terpenuhi.

b. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Guru

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik telah terpenuhi.

c. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Guru untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris telah memenuhi SPM.

d. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Kepala Sekolah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 tarakan, ketersediaan kepala sekolah berkualifikasi pendidikan S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidikan telah memenuhi SPM.

e. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Pengawas Sekolah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, ketersediaan pengawas sekolah berkualifikasi pendidikan S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidikan telah memenuhi SPM.

f. Jam Proses Pembelajaran di Satuan Pendidikan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, pada kelas VII jam perminggu selama 38 Jam, Pada kelas VIII selama 39 Jam, dan Pada Kelas IX selama 39 Jam. Dengan Demikian penyelenggaraan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan pembelajaran Kelas VII-IX selama 27 jam per minggu telah terpenuhi.

Dari hasil temuan penelitian pada implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan dasar pada indikator pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan bahwa keseluruhan SPM sudah terpenuhi.

Tuntutan sebagai guru profesional harus memenuhi persyaratan sesuai PP no. 74 th. 2008 tentang Guru dan Dosen dan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pemenuhan jam mengajar guru dan jam proses pembelajaran yang sesuai akan memberikan dukungan kebermutuan layanan pembelajaran

3. Kurikulum

a. Kegiatan Pemerintah Daerah dalam Membantu Satuan Pendidikan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan telah mendukung satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

b. Penerapan Kurikulum Satuan Pendidikan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 3 Tarakan, telah melaksanakan kurikulum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SPM pendidikan dasar. Dimana sekolah mereka telah menerapkan kurikulum KTSP, dan walaupun telah dikeluarkan kurikulum tahun 2013, namun sekolah mereka masih menggunakan kurikulum KTSP, dan baru tahun 2014 akan melaksanakan kurikulum 2013.

c. Guru yang menerapkan RPP di Satuan Pendidikan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, tidak semua guru telah menerapkan RPP berdasarkan silabus. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut tidak memenuhi standar

pelayanan minimum pendidikan dasar.

Dari hasil temuan penelitian pada implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan dasar pada indikator kurikulum menunjukkan bahwa implementasi SPM belum terpenuhi oleh SMP Negeri 3 Tarakan.

Karena Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang memiliki prinsip otonomi yang menuntut partisipasi warga sekolah dan semua *stakeholder* pada tingkat satuan pendidikan, maka arah dan kebijakan KTSP serta keberhasilannya ditentukan oleh kerjasama semua pihak yang terkait Standar isi merupakan bagaian inti dari struktur kurikulum (KTSP) yang ditampilkan dalam bentuk mata pelajaran sesuai standar yang berlaku dan muatan lokal. Pengembangan mata pelajaran diuraikan dalam bentuk silabus dan RPP. Kurikulum dikembangkan dengan sejumlah prinsip yaitu diantaranya memperhatikan kebutuhan kehidupan, menyeluruh, dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Oleh karrena itu perlu diatur beban belajar supaya dapat memberi pelayanan kepada peserta didik secara proporsional sesuai usia dan tingkat perkembangannya. Hal ini sesuai dengan lampiran Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang Standar Isi yang menyatakan bahwa pengembangan KTSP harus memperhatikan prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan

lingkungannya. Hal ini perlu dijadikan rambu-rambu karena esensi dari KTSP bersifat otonomi dan kontekstual dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

4. Penjaminan Mutu Pendidikan

a. Kegiatan Kunjungan Pengawas ke Satuan Pendidikan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan dalam 1 bulan biasanya lebih dari 1 kali jika ada hal-hal yang perlu diinformasikan, namun untuk setiap kunjungannya tidak selalu tetap minimal 3 jam, bahkan seringkali kurang dari 3 jam.

b. Kegiatan Supervisi Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah di SMP Negeri 3 Tarakan, telah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

c. Laporan Evaluasi Guru di Satuan Pendidikan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap guru di SMP Negeri 3 Tarakan, telah menyampaikan laporan hasil evaluasi pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

d. Pelaporan pendidikan peserta didik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tarakan telah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian

Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota pada setiap akhir semester.

Dari hasil temuan penelitian pada implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan dasar pada indikator penjaminan mutu pendidikan menunjukkan bahwa implementasi SPM belum terpenuhi oleh SMP Negeri 3 Tarakan.

Dalam bidang pendidikan, pandangan tentang mutu tersebut dapat dilihat dari standar-standar yang telah ditetapkan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan dari kepuasan pelanggan atau konsumen pendidikan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting jelas perlu melihat suatu organisasi dalam kaitannya dengan mutu karena pada akhirnya baik mutu dalam fakta maupun menurut persepsi dan harapan jelas akan menentukan bagi keberhasilan dan kesinambungan kiprah organisasi, dan hal ini tentu saja berlaku dalam bidang organisasi dan kelembagaan pendidikan seperti Sekolah.

Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dimana dalam peraturan ini disebutkan bahwa Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan

masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan UUD 1945 yang dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

5. Penilaian Pendidikan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap guru di SMP Negeri 3 Tarakan, telah mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

Cakupan indikator ini meliputi penilaian formatif dan sumatif, proses dan hasil belajar peserta didik, dan upaya-upaya guru/pendidik mengembangkan kemampuan peserta didik.

Dari hasil temuan penelitian pada implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan dasar pada indikator penilaian pendidikan menunjukkan bahwa implementasi SPM dapat dipenuhi oleh SMP Negeri 3 Tarakan

Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus dilakukan secara berkesinambungan, agar dapat memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran (*Permendiknas No 20 tahun 2007*). Kegiatan penilaian meliputi: penginformasian silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester; pengembangan

indikator pencapaian Kompetensi Dasar (KD) dan pemilihan teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran; pengembangan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih; pelaksanaan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan; pengolahan hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik; pengembalian hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik; pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran; pelaporan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh; dan pelaporan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan digunakan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

Hal ini sesuai dengan Wahab (2008) yang mengemukakan, bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan. Sehingga implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan

yang diinginkan. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.

6. Manajemen Sekolah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan telah menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dimana di sekolah tersebut telah memiliki rencana tahunan sekolah yang berisi rencana anggaran dan pemeliharaan fasilitas sekolah.

Dari hasil temuan penelitian pada implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan pada indikator manajemen sekolah menunjukkan bahwa implementasi SPM dapat dipenuhi oleh SMP Negeri 3 Tarakan

MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Secara umum, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Manajemen berbasis sekolah dapat bermakna jika ada

desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan atas masalah signifikan terkait penyelenggaraan sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas.

Hal ini sesuai dengan Soenarko (2005) yang mengemukakan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan, seperti: 1. persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat; 2. isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu; 3. pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran; 4. pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMP Negeri 3 Tarakan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang SPM telah mengatur tentang kuantitas dan kualitas layanan minimal yang harus disediakan oleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota (c/q Dinas Pendidikan), Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta setiap Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

Dengan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar, setiap Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi diri dan menyusun program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai SPM. Adapun faktor

pendukung dan penghambat penerapan standar pelayanan minimal pendidikan di SMP Negeri 3 Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Sarana Prasarana

a. Jumlah dalam setiap rombongan kelas dan kelengkapan kelas

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Menyebutkan bahwa jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, dan untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan Semua Rombongan Belajar tidak ada yang melebihi 36 orang. Namun ada yang menarik dari sekolah ini, yaitu menggunakan sistem *moving class*. Sistem ini diberlakukan karena ruangan kelas untuk kegiatan belajar mengajar tidak sebanding dengan banyaknya rombel. Dan peneliti melihat hal ini sebagai faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMP Negeri 3. Menurut Bapak Agus Salim selaku Waka Sarana Prasarana pihak sekolah menjadikan ruangan ruangan yang ada menjadi ruang per mata pelajaran. Beliau menyatakan seperti berikut:

“Jika ruangan itu kita jadikan kelas per rombel jelas tidak cukup, jumlah rombel disini ada 30. Sedangkan ruangan yang ada tidak sebanyak itu.”

b. Ketersediaan buku teks pelajaran

Menurut standar pelayanan minimal pendidikan dasar, setiap SMP/MTS menyediakan buku teks mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

Dari hasil penelitian terlihat masih ada kesenjangan dalam ketersediaan buku teks pelajaran antara lain pada kelas 7, ketersediaan buku teks semua mata pelajaran tidak mencukupi untuk tiap siswa. Pada kelas 8, ketersediaan buku teks Matematika, Bahasa Inggris, Pkn, Prakarya, dan Agama tidak mencukupi, dan pada kelas 9, ketersediaan buku teks Prakarya dan Agama tidak memenuhi SPM.

Dari data diatas semua tingkatan kelas masih terdapat kesenjangan terhadap ketersediaan buku teks pelajaran. Kendala dalam hal ketersediaan buku teks pelajaran menurut Ibu Desi Apriani adalah pada proses pengadaan buku tersebut. Pihak CV Pengadaan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan belum dapat memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran khususnya pada kelas 7. Selanjutnya menurut Ibu Evy kendala yang dihadapi ialah proses pemeliharaan, kedisiplinan siswa dalam menjaga buku sering terabaikan. masih ada keraguan apakah buku harus dibagi ke siswa untuk di bawa pulang atau hanya dipinjamkan saat pelajaran berlangsung. Senada dengan ibu Halida, sosialisasi baik pada peserta didik, orang tua peserta didik, serta komite sekolah tentang bagaimana seharusnya buku yang ada disekolah dimanfaatkan.

2. Kurikulum

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar menetapkan setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. Silabus adalah acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Dari hasil wawancara dengan Staff Tata Usaha bagian administrasi, beliau mengatakan bahwa semua guru memang mempunyai RPP yang sesuai dengan silabus, namun hal tersebut bukanlah jaminan untuk mereka telah menerapkan dengan baik RPP tersebut. Terutama pada guru guru yang sudah senior, mereka sudah terbiasa mengajar dengan gaya mereka masing masing, walaupun tetap sejalan dengan mata pelajaran yang diajarkan.

3. Penjaminan Mutu Pendidikan

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar menetapkan kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Dari hasil wawancara dengan Waka Humas SMP Negeri 3 Tarakan Ibu Halida, Ia mengatakan bahwa kegiatan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan dalam 1 bulan biasanya lebih dari 1 kali jika ada

hal-hal yang perlu diinformasikan, namun untuk setiap kunjungannya tidak selalu tetap minimal 3 jam, bahkan seringkali kurang dari 3 jam.

Dari data diatas kegiatan pengawas terlihat flexibel dan tidak ada jadwal tetap, sehingga ada kesan bahwa pengawas saat melakukan supervisi lebih pada silaturahmi, sehingga waktu minimal 3 jam tidak diketahui, apa yang harus dilakukan dengan waktu selama itu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah peneliti simpulkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Tarakan :

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya program pendidikan yang bermutu. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang SPM ini mengatur tentang kuantitas dan kualitas layanan minimal yang harus disediakan oleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota (c/q Dinas Pendidikan), Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta setiap Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.
2. Indikator SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mencakup beberapa jenis layanan, yaitu: (1) Sarana Prasarana, (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (3) Kurikulum, dan (4) Penjaminan Mutu Pendidikan. Indikator SPM yang menjadi tanggung jawab langsung SMP/MTs mencakup beberapa jenis layanan, yaitu: (1) Sarana Prasarana, (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (3) Kurikulum, (4) Penilaian

Pendidikan, (5) Penjaminan Mutu Pendidikan, dan (6) Manajemen Sekolah.

3. Pada indikator sarana dan prasarana, temuan penelitian menunjukkan indikator yang memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah keterjangkauan jarak satuan pendidikan, jumlah siswa dalam setiap rombongan kelas, kelengkapan kelas, ketersediaan ruang guru dan kelengkapannya, ketersediaan buku pengayaan dan buku referensi, serta jam kerja guru tetap di satuan pendidikan. Sedangkan indikator yang belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah ketersediaan buku teks pelajaran, dimana temuan penelitian menunjukan bahwa di SMP Negeri 3 Tarakan, pada kelas 7 ketersediaan buku teks semua mata pelajaran tidak mencukupi untuk tiap siswa. Pada kelas 8, ketersediaan buku teks matematika, bahasa inggris, Pkn, prakarya, dan agama tidak mencukupi, dan pada kelas 9, ketersediaan buku teks prakarya dan agama tidak memenuhi SPM.
4. Pada indikator pendidik dan tenaga kependidikan, temuan penelitian menunjukkan indikator yang memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah ketersediaan guru pada satuan pendidikan, kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik guru, kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik kepala sekolah, kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik pengawas sekolah.
5. Pada indikator kurikulum, temuan penelitian menunjukkan indikator

yang memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah kegiatan pemerintah daerah dalam membantu satuan pendidikan, penerapan kurikulum satuan pendidikan, sedangkan indikator yang belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah guru yang menerapkan RPP di satuan pendidikan, dimana temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak semua guru dapat menerapkan RPP berdasarkan silabus.

6. Pada indikator penjaminan mutu pendidikan, temuan penelitian menunjukkan indikator yang memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah kegiatan supervisi kepala sekolah di satuan pendidikan, laporan evaluasi guru di satuan pendidikan, dan pelaporan pendidikan peserta didik. Sedangkan indikator yang belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah kegiatan kunjungan pengawas ke satuan pendidikan,
7. Pada indikator penilaian pendidikan, temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap guru di SMP Negeri 3 Tarakan, telah mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
8. Pada indikator manajemen sekolah, temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap guru di SMP Negeri 3 Tarakan, telah menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dimana di sekolah tersebut telah memiliki rencana tahunan sekolah yang berisi rencana anggaran dan pemeliharaan fasilitas sekolah.

9. Faktor pendukung dari proses implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMP Negeri 3 ialah penggunaan sistem *moving class*. Sistem ini diberlakukan karena ruangan kelas untuk kegiatan belajar mengajar tidak sebanding dengan banyaknya rombel.
10. Kendala yang dihadapi sekolah dalam menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang mencakup seluruh mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik adalah pada proses pengadaan buku tersebut. Pihak CV Pengadaan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan belum dapat memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran khususnya pada kelas 7. Selain itu pada faktor proses pemeliharannya, kedisiplinan dalam menjaga buku teks oleh peserta didik sering terabaikan, masih ada keraguan apakah buku harus dibagi ke siswa untuk di bawa pulang atau hanya dipinjamkan saat pelajaran berlangsung serta kurangnya sosialisasi baik pada peserta didik, orang tua peserta didik, serta komite sekolah tentang bagaimana seharusnya buku yang ada disekolah dimanfaatkan.
11. Kendala yang dihadapi sekolah dalam memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar yang menetapkan kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise dan pembinaan adalah tidak ada jadwal tetap dari pengawas sekolah,

sehingga ada kesan bahwa pengawas saat melakukan supervisi lebih pada silaturahmi, sehingga target minimal kunjungan selama 3 jam di satuan pendidikan tidak terukur apa yang harus dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar, perlu disusun perencanaan program/kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukur sejauh mana kinerja dinas pendidikan telah mencapai SPM atau belum maka dinas pendidikan perlu melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan/depag serta sekolah-sekolah (SD/MI dan SMP/MTs). Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM.
2. Dinas Pendidikan perlu menganalisis pencapaian masing-masing indikator yang tercantum dalam standar pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis pencapaian SPM.

3. Agar Dinas Pendidikan Kota Tarakan segera menuntaskan kekurangan terhadap sarana dan prasarana penunjang pendidikan di SMP Negeri 3 Tarakan, yaitu buku teks pelajaran.
4. Buku teks pelajaran sangat urgen untuk menjamin berlangsungnya pendidikan berkualitas di sekolah. Untuk itu mesti diupayakan memenuhi kebutuhan buku ini sehingga setiap siswa dapat menggunakan satu paket buku teks pelajaran.
5. Diperlukan lagi penambahan guru SMP Negeri 3 Tarakan, dan diperlukan peningkatan kualitas guru yang ada. Penambahan jumlah guru dimaksudkan agar tiap guru memiliki jam kerja yang maksimal, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Dan mesti diupayakan untuk semaksimal mungkin meningkatkan kualifikasi guru sehingga berpendidikan minimal S1/D-IV dan bersertifikat mengajar.
6. Perlu adanya sosialisasi tentang bagaimana penerapan RPP serta adanya monitoring dan evaluasi dari pihak sekolah terkait penerapannya, agar sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan.
7. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang penting karena akan menentukan bagi keberhasilan dan kesinambungan kiprah sekolah. Pelaksanaan peran dan tugas pengawasan di sekolah sebenarnya dapat diposisikan dalam upaya penjaminan mutu yang diimbangi dengan peningkatan mutu. Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif superstruktur organisasi sekolah atau kepala sekolah

dan pendekatannya bersifat *top down*, sementara peningkatan mutu berkaitan dengan pemberdayaan anggota organisasi sekolah untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pendidikan baik menyangkut peningkatan kompetensi individu, maupun kapabilitas organisasi melalui inisiatif sendiri sehingga pendekatannya bersifat *bottom up*. Dalam kaitan tersebut, maka pengawasan di sekolah perlu lebih menekankan pada mutu dengan pemantauan kesesuaian dengan standar-standar pendidikan, sehingga peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat menjadi gerakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, (1997). *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Sarana Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dimiyati, M. (2000). *Demokratisasi belajar pada lembaga pendidikan dalam masyarakat Indonesia transisional: Suatu analisis epistemologi ke Indonesiaan*, Malang: CV. Wineka Media.
- Freire, P. (1985). *Pendidikan kaum tertindas*, Jakarta: LP3S
- H. A. R. Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadari Nawawi. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haris, Syamsudin. (2005). *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI press.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. (2011). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- John W. Creswell. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono. (1997). *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B. and Huberman, Michael A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanafiah, Faisal. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: IKIP Malang.
- Siswoyo, Dwi. (2007). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Solahuddin, Kusumanegara. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Solichin A, Wahab. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Cetakan VI, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soenarko. SD. MPA. Drs. (2005). *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Menganalisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Cetakan VII. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. (2001). Formula Pendidikan Nasional Era Global. *Makalah*. Disajikan dalam simposium pendidikan nasional dan munas I alumni PPS.UM. di Malang, 13 Oktober 2001.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance Telaah dari Dimensi :Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- Suprptomo, Bambang (2009) Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129^a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah. (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Ngrambe Kabupaten Ngawi). *Tesis* Program Magister Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Harmiyanto (2009) Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129^a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah(Studi Deskriptif SMA Negeri 4 Sidoharjo Kecamatan Soko Kabupaten Sidoharjo). *Tesis*, Program Magister Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. (2004). Jakarta: Kemendagri.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah*. (2004). Jakarta: Kemendagri
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional*. (2003). Bandung: Citra Umbara
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum*. (2005). Jakarta: Kemendagri
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.(2005). Jakarta: Kemendiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota*. (2010). Jakarta: Kemendiknas.

<http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/2772-indonesia-masih-butuh-industri-padat-karya.html> diunduh tanggal 20 oktober pukul 19.10 WIB

<http://bsnp-indonesia.org> diunduh tanggal 20 oktober pukul 20.00 WIB

<http://www.jpnn.com/read/2013/10/30/198395/Menakertrans:-Indonesia-dalam-Keadaan-Darurat-SDM->. diunduh tanggal 20 oktober 2013 pukul 19.00 WIB

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/10/131009_indonesiagci_bisnis.shtml diunduh tanggal 20 Oktober pukul 19.15 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

SURAT-SURAT PERIJINAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094
Telp. (0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295, 344, 345, 366, 368, 369, 401, 402, 403, 417)



Certificate No. QSC 006

No. : 809 /UN34.11/PL/2014
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

5 Februari 2014

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas Prov. DIY
Jl. Jenderal Sudirman 5
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Tazqy Hidayat
NIM : 09110241019
Prodi/Jurusan : KP/FSP
Alamat : Jl. Pakuningratan JT II no 47 Yogyakarta

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : SMP Negeri 3 Tarakan
Subyek : Pelayanan Pendidikan
Obyek : Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Waktu : Februari-Maret 2014
Judul : Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP 19600902 198702 1 001

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan FSP FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)**

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Februari 2014

Nomor : 074 / 342 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Kalimantan Timur
Up. Kepala BALITBANGDA
Provinsi Kalimantan Timur

Di
SAMARINDA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY
Nomor : 809 / UN.34.11/PL/2014
Tanggal : 05 Februari 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PALAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI SMP NEGERI 3 KOTA TARAKAN"**, kepada:

Nama : TAZQY HIDAYAT
NIM : 09110241019
Prodi/Jurusan : KP/FSP
Fakultas : Ilmu Pendidikan UNY
Lokasi : SMP Negeri 3 Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur
Waktu : Februari s.d Maret 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Sudirman No 1 Telp.(0541) 733333 Pes. 242,232 Fax.741594,733453
SAMARINDA

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/250/IV-BKP/II/2014

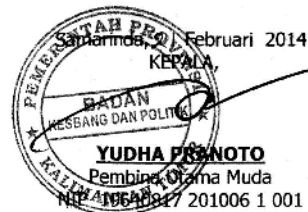
- a. Dasar : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : S.D.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : 1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Nomor. 809/UN.34.11/PL/2014, tanggal 5 Februari 2014. Hal. Permohonan Izin Penelitian.
2. Surat Kepala Badan Kesbang dan Perlindungan Masyarakat Yogyakarta Nomor : 074/342/Kcsbang/2014. Hal Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / Obyek : **TAZQY HIDAYAT**
- b. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa Peneliti/Universitas Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan.
Karangmalang, Yogyakarta 55281, Telp. 0274-586168 /No. KTP.
6473031809910004 / NIM : 09110241019.
- c. Untuk : 1. Melakukan penelitian dengan proposal berjudul " Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan "
2. Lokasi Penelitian : Kota Tarakan
3. Waktu/Lama Penelitian : Februari s/d Maret 2014
4. Anggota Tim Peneliti : -
5. Bidang Penelitian : Pendidikan
6. Status Penelitian : Baru

1. Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY di Yogyakarta
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan di tarakan
4. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tarakan di Tarakan



BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Halmahera Nomor 140 Telepon (0551) 32083 - 32111

T A R A K A N (Kode Pos 77121)

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/007/KESBANGPOL-LINMAS

- Membaca : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 070/200/IV-BKP/II/2014 Tanggal 21 Februari 2014 Perihal Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SD. 6 / 2 / 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Riset dan Survei diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur KDH atau Pejabat yang ditunjuk;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 067/8613/Org tanggal 19 Desember 2001 tentang Rekomendasi Penelitian;
9. Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 070/085/III/Litbang tanggal 20 Februari 2002 tentang Rekomendasi Penelitian;
10. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 44 Tahun 2003 tentang Buku Pedoman Pelayanan Informasi dan Prosedur Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
- Memperhatikan : Permohonan yang bersangkutan
- Nama : **TAZQY HIDAYAT**
- NIM : 09110241019
- Program Studi : Kebijakan Pendidikan
- Alamat : Kampung Enam No.4 RT.10 Kecamatan Tarakan Timur
Telp. 082226878551
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : Indonesia
- Judul Proposal : "Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah Di SMP Negeri 3 Kota Tarakan".

Lama Penelitian : 3 Maret 2014 s/d 3 April 2014

Daerah Penelitian : Kota Tarakan

Pengikut : -

Penanggung jwb : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Maksud & Tujuan : Sesuai dengan Proposal Penelitian

Akan melakukan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan kegiatan penelitian pada Badan, Dinas, Kantor, Instansi atau Lembaga serta penelitian lapangan agar melaporkan kedatangannya kepada pimpinan Badan, Dinas, Kantor, Instansi atau Lembaga setempat.
2. Tidak dibenarkan mengadakan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati semua ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku surat rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, dapat diperpanjang setelah melaporkan ke Pemerintah Kota Cq. Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tarakan disertai dengan alasan-alasan/keterangan bahwa pelaksanaan penelitian tersebut tidak selesai pada waktu yang ditentukan.
5. Sebelum mengadakan penelitian, wajib berkonsultasi dalam masalah-masalah teknis penelitian kepada Kepala Bappeda Kota Tarakan.
6. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
7. Setelah mengadakan penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Walikota Tarakan Cq. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tarakan.

Dikeluarkan di : Tarakan.

Pada Tanggal : 28 Februari 2014

KEPALA,

H. MUHAMMAD IDRUS, S.IP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196203061986021002

TEMBUSAN :

1. Walikota / Wakil Walikota Tarakan (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kota Tarakan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
4. Kepala SMP Negeri 3 Tarakan
5. Sdr. Tazqy Hidayat



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 TARAKAN**

Jalan Sungai Brantas Kampung Empat, Tarakan Timur 77124
Telp./Fax (0551) 22862/30031
Website: www.smpn3Tarakan.sch.id, E-Mail: smpn3trk@gmail.com
T A R A K A N

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN


Nomor : 423.6 / 078 / SMPN.3

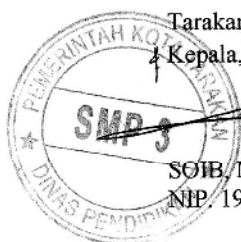
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 3 Tarakan menerangkan bahwa :

Nama : TAZQY HIDAYAT
NIM : 09110241019
Jurusan : Filsafat dan Sosiologi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di SMP Negeri 3 Tarakan pada bulan Februari s.d. Maret 2014 untuk keperluan penyelesaian skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarakan, 11 Maret 2014
Kepala,

SOIB/M.Pd.
NIP. 19610113 198301 1 003





PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Tarakan
Telp. (0551) 32867, Fax. 23811, E-mail : disdik tarakan @Yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/312 /DISDIK

Berdasarkan Surat dari SMP Negeri 3 Tarakan Nomor : 423.6/078/SMPN.3 Tanggal 11 Maret 2014 menerangkan bahwa :

Nama : TAZQY HIDAYAT
Nim : 09110241019
Jurusan : Filsafat dan Sosiologi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada I
Otonomi daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan

Bahwa benar yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan penelitian di SMP Negeri 3 Tarakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2014 untuk keperluan penyelesaian skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarakan, 17 Maret 2014

An. KEPALA DINAS
SEKRETARIS



LAMPIRAN 2.

PEDOMAN WAWANCARA

**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI SMP NEGERI 3
TARAKAN**

- 1. Pejabat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta**
- 2. Kepala Sekolah**
- 3. Tenaga Pendidik**
- 4. Tenaga Kependidikan**

Pedoman wawancara

A. Sumber Data/Informan (Utama):

- Kepala/Pejabat Berwenang Dinas Pendidikan Kota Tarakan
1. Apakah Bapak mengetahui adanya Permendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar ?
 2. Apakah sudah di terapkan di Kota Tarakan ?
 3. Bagaimana penerapannya ? apakah memiliki kendala kendala yang dapat menghambat proses implementasinya ?

B. Sumber Data/Informan (Utama):

- Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Tarakan
 - Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Tarakan
 - Tenaga Pendidikan dan Kependidikan SMP Negeri 3 Kota Tarakan
1. Bagaimana keterjangkauan jarak sekolah dengan pemukiman/rumah para peserta didik ?
 2. Apakah jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar di SMP Negeri 3 Tarakan tidak melebihi 36 orang.
 3. Apakah di SMP Negeri 3 Tarakan memiliki ruang Laboratorium IPA, apakah dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik. Apakah ada satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik ?

4. Apakah di SMP Negeri 3 Tarakan menyediakan buku teks untuk semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set setiap peserta didik.
5. Apakah di SMP Negeri 3 Tarakan memiliki 200 judul pengayaan dan 20 buku referensi.
6. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Membantu Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
7. Bagaimana penerapan Kurikulum di Satuan Pendidikan ?
8. Apakah guru menerapkan RPP berdasarkan silabus ?
9. Bagaimana kegiatan Kunjungan Pengawas ke Satuan Pendidikan
10. Bagaimana kegiatan Supervisi Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan ?
11. Bagaimana laporan Evaluasi Guru di Satuan Pendidikan ? apakah dilaporkan kepada kepala sekolah ?
12. Apakah ada pelaporan pendidikan peserta didik kepada orang tua ?
13. Bagaimana cara penilaian pendidikan yang dilakukan oleh guru guru disini ?
14. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang MBS ? apakah sudah ada penerapannya disini ?

LAMPIRAN 3.

CATATAN LAPANGAN DAN HASIL WAWANCARA

CATATAN LAPANGAN

Hari : Jumat
Tanggal : 28 Februari 2014

Pagi itu sekitar pukul 09.00 WIB, peneliti berkunjung ke SMP Negeri 3 Tarakan, dengan berbekal surat ijin penelitian dari kesbanglinmas Kota Tarakan peneliti pertama tama bersilaturahmi sembari temu kangen dengan guru guru disana. Begitu sampai di sekolah peneliti langsung menuju ruang Tata Usaha untuk menyerahkan surat, begitu surat ijin peneletian mendapat disposisi dari Kepala Sekolah peneliti langsung diarahkan untuk mencari Ibu Halidah selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Hbungan Masyarakat (Wakahumas).

Setelah dirasa cukup kemudian peneliti menuju ke ruang Wakil Kepala Sekolah untuk mencari Ibu Halidah. Setelah memasuki ruang tersebut peneliti disambut dengan hangat oleh Ibu Halidah, karena memang dulu peneliti merupakan salah satu murid dari beliau. Setelah berbincang bincang lama, maka peneliti memulai obrolan yang menyinggung tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Peneliti pun menyampaikan maksud tujuannya kepada Ibu Halidah, dengan senang hati Ibu Halidah menerima dan menyatakan kesiapannya untuk membantu peneliti untuk memperoleh data nantinya. Ibu Halidah juga menanyakan sedikit tentang judul dan metode penelitian dari peneliti nantinya kemudian peneliti memberikan penjelasan. Setelah mendapat penjelasan dari peneliti tentang judul dan metode penelitian, Pak Edy pun memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan disana, dan siapa saja orang yang bisa membantu peneliti dalam memperoleh data serta mengumpulkan informasi.. Kemudian peneliti meminta nomor handphone Ibu Halida untuk koordinasi dan komunikasi selanjutnya. Setelah maksud dan tujuan peneliti tercapai peneliti pun memohon ijin untuk pulang.

Hari : Senin
Tanggal : 3 Maret 2013

Berdasarkan hasil Kunjungan hari pertama kemarin, hari ini peneliti datang kembali ke SMA Negeri 4 Yogyakarta. Peneliti tiba di sekolah pukul 08.30, karena hari itu peneliti sedikit terlambat. Upacara bendera sudah selesai, maka peneliti melihat lihat saja sembari mendekatkan diri dengan para siswa dan guru guru di lapangan olahraga. sekolah. Dari situ peneliti dapat melihat bahwa jumlah keseluruhan peserta didik kelas tersebut tidak melebihi 36 orang, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh SPM Pendidikan.

Tidak beberapa lama peneliti melakukan pengamatan kemudian datang Pak Agus Salim, kebetulan beliau tidak sedang ada kelas. Di kesempatan itu peneliti menggali informasi tentang bagaimana keadaan Sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Tarakan. Bapak Agus Salim merupakan Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana. Sembari mengobrol, Pak Agus Salim menyempatkan diri mengajak peneliti untuk berkeliling dan menunjukkan bagaimana keadaan

yang sesungguhnya. Dengan demikian peneliti dapat membandingkan dengan seksama, antara SPM Pendidikan yang telah ditentukan pemerintah, dengan kondisi yang sesungguhnya di SMP Negeri 3 Tarakan. Setelah dijelaskan dengan jelas, maka peneliti meminta izin untuk mengambil Foto. Selesai mengambil Foto peneliti menemui Pak Agus kembali di sekolah. Peneliti meminta bantuan beliau untuk menentukan dan bertemu dengan beberapa informan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pak Agus menyarankan kepada peneliti untuk bertemu Ibu Evy selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum agar lebih paham tentang informasi yang peneliti ingin ketahui. Dan kebetulan pada hari itu ibu Evy sedang tidak ada jam kosong sampai dengan jam 12 siang. Maka peneliti hanya berkeliling dan bermain dengan murid- murid karena kebetulan sedang istirahat sekolah. Setelah bertemu sebentar dengan ibu Evy, beliau menyarankan untuk bertemu lagi dengannya esok hari agar beliau dapat menyiapkan semua informasi yang peneliti butuhkan.

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Maret 2013

Pada Hari Kamis peneliti berkunjung ke Kantor Dinas Pendidikan Sembari menyerahkan surat izin penelitian, kebetulan ada mantan guru SMA peneliti yang sudah pindah tugas menjadi staff di Kantor tersebut. Peneliti berbincang bincang tentang maksud dan tujuan peneliti datang kesana. Beliau memberikan arahan untuk langsung dilanjutkan ke Sekolah karena memang disekolah yang lebih mengetahui seluk beluk penerapan SPM pendidikan itu.

Setelah berpamitan peneliti langsung bergegas ke SMP Negeri 3 Tarakan, pada saat itu peneliti langsung ke ruang Kepala Sekolah. Diruangan yang terasa nyaman tersebut peneliti disambut dengan baik, dan disuguhi berbagai makanan dan minuman. Kepala sekolah sudah mengetahui bahwa peneliti akan melakukan kegiatan di sekolah tersebut. Baoak Soib selaku kepala sekolah yang baru saja menjabat menyarankan kepada peneliti untuk jangan sungkan untuk menggali informasi yang peneliti butuhkan. Sedangkan untuk informasi informasi yang lebih detail beliau menyarankan agar peneliti bertemu langsung dengan wakil kepala sekolah maupun staff tata usaha yang lebih bisa memberikan informasi tersebut.

**HASIL WAWANCARA MENDALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI SMP NEGERI 3
TARAKAN**

Informan : Kabag Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kota Tarakan

Tempat : Ruang Kabag Pendidikan Menengah

Hari/Tanggal: Selasa, 4 Maret 2014

Waktu : 07.30 – 08.00 WIB

1. Apakah Bapak mengetahui adanya Permendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar ?

Jawaban :

“Masalah SPM itu ya ? kayanya pernah dengar saya soalnya sudah lama pernah rapat sama Kepala Dinas membahas permendiknas SPM itu dek.”

2. Apakah sudah di terapkan di Kota Tarakan ?

Jawaban :

“Sudah...sudah lama kita terapkan itu, sudah disosialisasikan mulai awal 2011 kalau tidak salah. Karena itu putusan dari pusat jadi lama sampai disini, padahal kan itu permendiknas tahun 2010. Kita dapat surat putusan seperti itu ya langsung di rapatkan untuk ditindak lanjuti di lapangan.”

3. Bagaimana penerapannya ? apakah memiliki kendala kendala yang dapat menghambat proses implementasinya ?

Jawaban :

“ Untuk teknis penerapan itu kita berikan otoritas penuh kepada sekolah dek. Sedangkan kendala kendala yang muncul itu juga detail pastinya sekolah sekolah yang tahu. Kita sebagai fasilitator untuk kebutuhan kebutuhan yang mereka butuhkan saja. Kalau ada apa-apa pun pasti kita dapat laporan dari sekolah sekolah itu, baru kita bisa bergerak.”

**HASIL WAWANCARA MENDALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI SMP NEGERI 3
TARAKAN**

**Informan : Kepala/Wakil Kepala Sekolah, Para Guru dan Staff Tata
Usaha/ Pegawai SMP Negeri 3 Kota Tarakan**

Tempat : Ruang Kepsek

Hari/Tanggal : Senin- Selesai, 3 Maret 2013 - Selesai

Waktu : 08.30 – 12.00 WIB

1. Bagaimana keterjangkauan jarak sekolah dengan pemukiman/rumah para peserta didik ?

Jawaban :

(Kepala Sekolah Bapak Soib)

“sepertinya tidak ada masalah mas, karena setau saya SMP 3 ini letaknya sangat strategis. Lagian untuk kecamatan tarakan timur sendiri ada 4 SMP Negeri”

(Waka Humas Ibu Halida)

“Walaupun ada yang rumahnya jauh, pasti bisa dianter sama orang tuanya atau mereka ada yang carter angkot untuk pergi kesekolah”

2. Apakah jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar di SMP Negeri 3 Tarakan tidak melebihi 36 orang ? Lalu bagaimana tentang jumlah ketersediaan meja, kursi, meja guru, kursi guru, dan papan tulis di setiap ruang kelas ?

Jawaban :

(Kepala Sekolah Bapak Soib)

“karena saya baru disini jadi saya belum terlalu paham keadaan disini mas, mungkin untuk data banyaknya siswa per rombel nanti bisa dilihat di bagian tata usaha dan penjelasan lebih detail ke bapak Agus Salim, beliau sebagai Wakil Kepala Bagian Sarana Prasarana.”

(Waka Sarana Prasarana Bapak Agus Salim)

“Di sekolah ini menggunakan sistem moving class, jadi kelas-kelas yang ada tidak menyesuaikan dengan banyaknya rombongan belajar yang ada tetapi mengikuti banyaknya jumlah mata pelajaran. Dan di tiap ruang kelas tersebut ketersediaan meja dan kursi siswa lebih dari cukup, serta meja dan kursi guru pasti ada. Jika ruangan itu kita jadikan kelas per rombongan belajar jelas tidak cukup, jumlah rombongan belajar disini ada 30. Sedangkan ruangan yang ada tidak sebanyak itu.”

3. Apakah di SMP Negeri 3 Tarakan memiliki ruang Laboratorium IPA, apakah dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik? Apakah ada satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

Jawaban :

(Kepala sekolah Bapak Soib)

“lab ipa disini ada kok, malah ada dua mas. Coba nanti sampeyan main kesana.”

(Penanggung jawab Laboratorium IPA Ibu Nunik)

“Untuk laboratorium ipa di SMP Negeri 3 dibagi menjadi dua mas, ada lab fisika dan lab biologi. Jumlah kursi dan meja mencukupi untuk semua siswa yang belajar di lab tidak pernah kelebihan kapasitas. Peralatan lab kita juga sudah sangat lengkap. Hanya sedikit yang rusak, seperti stopwatch, dan pipet karena pecah saat praktek.”

4. Apakah di SMP Negeri 3 Tarakan menyediakan buku teks untuk semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set setiap peserta didik.

Jawaban :

(Waka Kurikulum Ibu Evy)

“pengadaan mungkin tengah semester nanti buku sudah teralokasi di sekolah. Sebagai penggantinya buku buku tersebut dipakai satu buku berdua dua orang. Ada juga yang memfotocopy, tapi anak-anak disini pake buku asal-asalan, jadi ada yang hilang, ada yang rusak kena basah/hujan. Banyaklah kurangnya. Terus kami disini juga masih ragu, buku - buku itu

harus dibagi ke siswa untuk di bawa pulang atau hanya dipinjamkan saat pelajaran berlangsung”.

(Waka Humas Ibu Halida)

Buku teks sudah ada cuma masih ada yang kurang kayanya, tadi sudah ngobrol sama bu evy, gimana katanya ? kalau masalah kurang terawat itu memang harus ada sosialisasi pada peserta didik, orang tua peserta didik, serta komite sekolah tentang bagaimana seharusnya buku yang ada disekolah dimanfaatkan.

(Kepala Perpus Ibu Desi)

“Lengkap kok mas, coba nanti saya kasih data inventaris buku itu. Palingan yang masih kurang itu buat kelas 7. Memang dari pihak CV belum bisa ngasih semua. Kasian juga anak anak itu kadang mereka nda bisa belajar gara gara nda punya buku”

5. Apakah di SMP Negeri 3 Tarakan memiliki 200 judul pengayaan dan 20 buku referensi.

Jawaban :

(Kepala Perpus Ibu Desi)

“Ada mas,tapi untuk lebih pastinya nanti saya kasih data datanya.”

6. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Membantu Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.?

Jawaban :

(Kepala Sekolah Bapak Soib)

“perhatian dari Dinas Pendidikan sudah mendukung sekolah sekolah di Tarakan untuk mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Jadi kita buat semaksimal mungkin demi tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik”

(Waka Humas Ibu Halida)

“.....sudah pasti dari dukungan, baik materi, tenaga, waktu. Semua demi tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik”

7. Bagaimana penerapan Kurikulum di Satuan Pendidikan

Jawaban :

(Waka Kurikulum Ibu Evy)

“SMP 3 sudah melaksanakan kurikulum sebagaimana mestinya. walaupun telah dikeluarkan kurikulum tahun 2013, namun kita masih menggunakan kurikulum KTSP, dan pada tahun 2014 akan menggunakan kurikulum 2013.”

8. Apakah guru menerapkan RPP berdasarkan silabus ?

Jawaban :

(Staff Administrasi TU, Mbak Sekar yang tidak ingin dicantumkan namanya dalam penelitian ini, dan peniliti anggap ini adalah data sekunder)

“dari laporan bulanan setiap rapat itu pasti laporannya sudah menerapkan, Cuma kan gak tau gimana gimananya saat dikelas, apalagi guru guru tua yang sudah enak dengan cara pengajaran masing masing. Coba nanti kamu lihat di data yang saya kasih semuanya sudah menerapkan RPP berdasarkan silabus”

9. Bagaimana kegiatan Kunjungan Pengawas ke Satuan Pendidikan

Jawaban :

(Waka Humas Ibu Halida)

“mereka kunjungan dalam sebulan biasanya lebih dari 1 kali apalagi kalau ada hal-hal yang perlu diinformasikan, tapi tiap kunjungan itu nda pernah sampai lama lama apalagi sampai 3 jam. Kaya orang bertamu itu nah, seperti kaya silaturahmi aja kalau datang kesini he...he...he....”

10. Bagaimana kegiatan Supervisi Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan ?

Jawaban :

(Guru Biologi Ibu Sardina)

“kalau bapak kepala sekolah yang dulu itu (sebelum Pak Soib) biasanya memberikan supervisi kelas paling sedikit 2 kali dalam satu semester, trus juga sering ngasih umpan balik pada guru-guru di SMP Negeri 3 Tarakan contohnya pada saat rapat beliau nanya nanya tentang apa yang beliau instruksikan”

(Guru Agama Ibu Aminah)

“Belum tau ibu, soalnya kan pak soib baru disini, tapi kepala sekolah sebelumnya sudah bagus kok, pasti ada supervisi trus nanti di evaluasi saat rapat guru”

(Guru Sejarah Bapak Bernadus)

“pasti ada, sudah sesuai dengan standar yang ada kok, tenang saja mas. He..he..”

11. Bagaimana laporan Evaluasi Guru di Satuan Pendidikan ? apakah dilaporkan kepada kepala sekolah ?

Jawaban :

(Guru Agama Ibu Aminah)

Kami guru guru disini pasti menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran kepada kepala sekolah pada akhir semester abis itu nanti pas bagi rapor kita panggil/undang mereka, orang tua murid”

(Guru Bahasa Indonesia Ibu Nelly)

“pasti dilaporkan mas, masa iya gak dilpaorin, kan tiap selesai semesteran kita guru guru ada rapat dengan kepala sekolah”

(Guru Fisika Ibu Irawati)

“tiap semesteran kita laporkan ke kepala sekolah tentang perkembangan anak didik disini, nilai nilainya, sikapnya di kelas dan lain lain.”

(Guru Bahasa Indonesia Bapak Eris Arko)

“pelaksanaan pelaporan evaluasi terhadap anak didik selalu dilaporkan kepada kepala sekolah. Gunanya sebagai bahan pertimbangan kalau memang anak tersebut butuh perhatian lebih. Kalau perlu sampai kita panggil orang tua nya ke sekolah untuk membahas permasalahan anak anak mereka”

12. Apakah ada pelaporan pendidikan peserta didik kepada orang tua ?

Jawaban :

(Waka Humas Ibu Halida)

”Pasti ada nak, setiap semesteran kenaikan kelas maupun setelah ada hasil UAN kami undang mereka untuk melaporkan hasil penilaian anak anak kami kepada orang tua mereka di rumah”.

(Waka Kurikulum Ibu Evy)

“sudah menjadi kewajiban bagi sekolah untuk memberikan laporan kepada para bapak/Ibu murid, selain itu perkembangan sikap siswa disini mendapat perhatian yang serius dari kami, ada masalah sedikit kalau memang tidak bisa diatur, langsung kami panggil orang tuanya.”

13. Bagaimana cara penilaian pendidikan yang dilakukan oleh guru guru disini ?
Jawaban :

(Waka Kurikulum Ibu Evy)

“kita adakan rapat, seperti diskusi khusus yang membahas penilaian pendidikan agar ada kesamaan pada tiap guru dalam menerapkan penilaian pendidikan, baik dari pengembangan instrument, metode penilaian sampai pada pengolahan hasil penilaian pendidikan.”

14. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang MBS ? apakah sudah ada penerapannya disini ?

Jawaban :

“MBS itu manajemen berbasis sekolah, dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan hal itu sudah dilakukan di SMP Negeri 3 Tarakan.”

(Waka Sarana Prasarana Bapak Agus Salim)

“MBS itu intinya kepercayaan kepada kepala sekolah dan dewan sekolah untuk menentukan cara mencapai sasaran pendidikan di masing-masing sekolah harus dipenuhi. Harus ada kesepakatan tertulis yang memuat secara rinci peran dan tanggung jawab Dewan Pendidikan Daerah, Dinas Pendidikan Daerah, Kepala Sekolah, dan Dewan Sekolah. Kesepakatan itu harus dengan jelas menyatakan standar yang akan dipakai sebagai dasar penilaian akuntabilitas sekolah. Setiap sekolah perlu menyusun laporan

kinerja tahunan. Dan yang terpenting itu seberapa baik kinerja sekolah dalam upayanya mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana sekolah menggunakan sumber dayanya, dan apa rencana selanjutnya.”.

(Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tarakan)

“Konsep MBS merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentraliasi dalam pemerintahan. Dimana sekolah dipandang harus mampu melihat masalah mereka sendiri dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada. Sudah pasti kita menerapkan hal itu”

LAMPIRAN 4.
DOKUMENTASI FOTO



(SEBELUM KEBAKARAN PADA TAHUN 2006)



(SMP NEGERI 3 TARAKAN SEKARANG)